



**2022**

LAPORAN KINERJA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



## KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pada terdapat kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksanaan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Paringin, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak serta  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19730501 199311 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN.....	1
LANDASAN HUKUM.....	2
MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK.....	5
STRUKTUR ORGANISASI.....	8
BAB II PERENCANAN KINERJA.....	16
RENCANA STRATEGIS.....	16
PERJANJIAN KINERJA 2022.....	18
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022.....	29
AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	157
PENGHARGAAN YANG DITERIMA.....	185
INOVASI PERANGKAT DAERAH.....	186
BAB IV PENUTUP.....	187
LAMPIRAN	



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan sebuah dinas yang memiliki beberapa urusan yang meliputi urusan pelayanan dasar yaitu sosial dan urusan pelayanan non dasar yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal tersebut berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mengacu pada penjelasan diatas, dalam pelaksanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tahun 2022. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dengan 1 (satu) Indikator adalah Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani. Sementara Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya kesetaraan gender dengan 3 (tiga) indikator yaitu IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (indeks Pemberdayaan Gender), dan Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD. Selanjutnya sasaran ketiga adalah Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 2 (dua) indikator yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dan Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak). Dan Sasaran keempat adalah Meningkatnya klasifikasi desa dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase desa dengan klasifikasi minimal maju.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 5 bidang dan 1 sekretariat. Bidang-Bidangh tersebut meliputi Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial

dan Korban Bencana, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa.

Pecapaian Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada misi ke -5 RPJMD Periode tahun 2021-2026 yaitu “ Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif”. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu angka PPKS yang tertangani dan Indek Desa Membangun.

Berikut ini capaian indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perode Tahun 2021-2026:

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan target pada tahun 2022 sebesar 52,95% dan realiasi 68,72% sehingga persentase capaian 129,78%
2. Indeks Desa Membangun (IDM) dengan target 2022 adalah 0,6595 dan realiasi 0,7274 sehingga persentase capaian 110%. Dengan status Indeks Desa Membangun Kabupaten Balangan saat ini pada status Maju.

Selanjutnya berikut ini merupakan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022:

**Tabel 1.1**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Statartegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)</b>	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani	52,95%	68,72%	129,78%
<b>Meningkatnya kesetaraan gender</b>	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,74	92,33 **	99,56

	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	72	70,57 **	98,01
	Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD	21%	28,65%	136,43%
<b>Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak</b>	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14	17,4	75,71
	Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	1,9	2,7	57,89
<b>Meningkatnya klasifikasi desa</b>	Persentase desa dengan klasifikasi minimal maju	23,38%	66,88%	286,06%

Keterangan:

\* : Realisasi merupakan hasil pengolahan sementara

\*\* : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2021

## BAB I

### PENDAHULUAN

Terwujudnya kesejahteraan dan keadilan menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal tersebut menjadi tugas utama pemerintah, dimana perekonomian, kesejahteraan sosial menjadi salah satu Bab dalam Batang Tubuh UUD 1945 amandemen, dan menyiratkan pemberian hak ekonomi dan sosial yang luas bagi warga negara. Selain itu juga pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai bentuk penerapan hak asasi manusia, selanjutnya pemerintah juga hadir dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan desa sebagai bentuk mewujudkan masyarakat yang dapat berdaya sehingga dapat meningkatkan kemampuan desa untuk dapat memiliki daya saing sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat di masing-masing desa.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Balangan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup provinsi dan nasional.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan harapan semua pihak, dikarenakan diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pelaksanaan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **A. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
7. Instruksi Presiden nomor 09 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tah2018).
18. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Balangan
19. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).
20. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan ditahun 2022. Adapun tujuannya adalah pertama, Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

### **C. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Yang sebelumnya merupakan gabungan 3 (tiga) Urusan Pemerintah yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya perampingan Perangkat Daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa,

administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan bencana, administrasi pemerintahan dan penataan desa, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan bencana;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan dan penataan desa;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan kerjasama desa;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut:

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH
1	DINSOSPPPAPMD	
	- Eselon II	1 Orang
	- Eselon III	6 Orang
	- Eselon IV	3 Orang
	- Jabatan Fungsional Penyetaraan	12 Orang
	- Staf Dinas	31 Orang
	- Honor	92 Orang
	<b>- Total SDM pada Dinas</b>	<b>145 Orang</b>

Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung pelaksanaan tupoksi tersebut sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana Penunjang, yakni:

- Gedung Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Gedung/Gudang Logistik Bencana
- Bilik Singgah
- Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga
- Ruang Pengaduan terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan

Sarana Mobilitas mendukung kegiatan dinas:

- Mobil Double Cabin 1 Buah  
(Ops. Bencana)
- Mobil Double Cabin 1 Buah  
(Ops. Santunan Kematian)
- Mobil Truck Dapur Umum 2 Buah  
(Ops. Bencana)

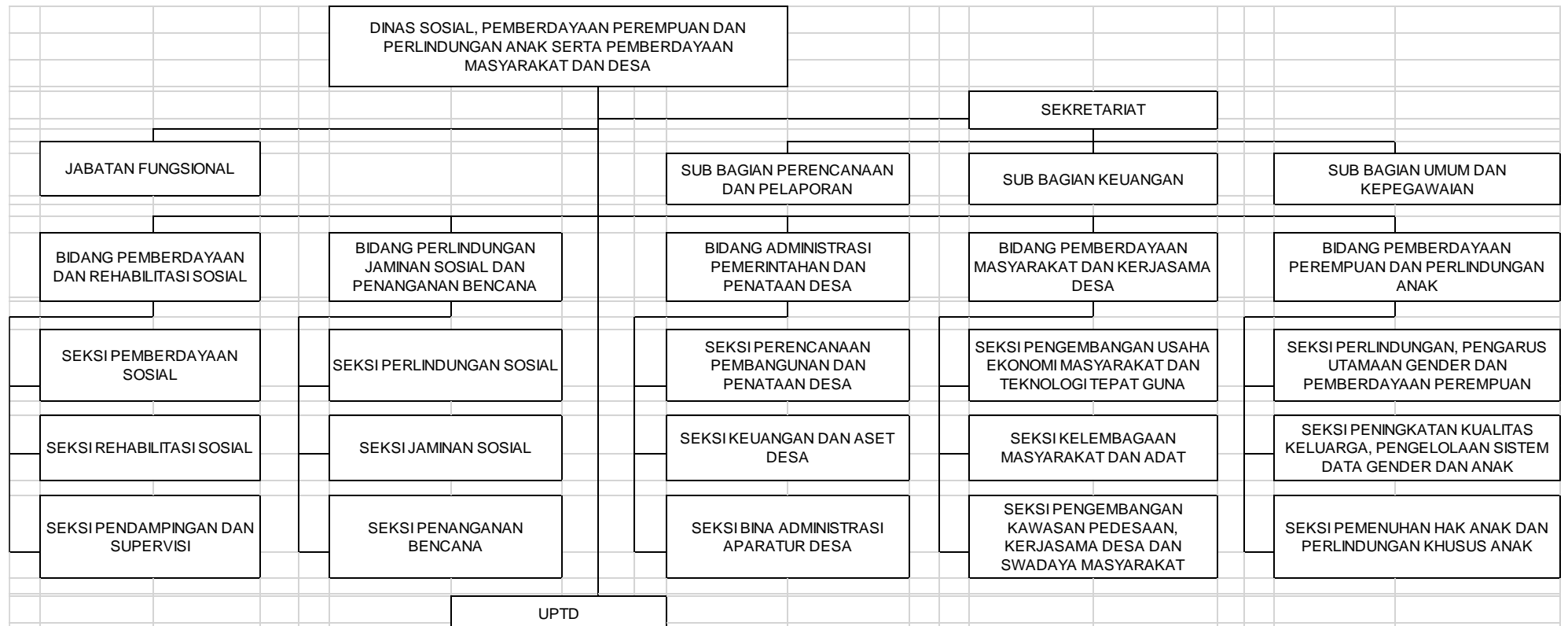


#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari: Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana, Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

**Bagan Struktur Organisasi**

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Startegis Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra tersebut menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan startegi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Berdasarkan pembagian urusan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menangani urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dan non pelayanan dasar yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Rencana Strategis (Renstras) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 .

Dalam rencana startegis 2021-2026 disebutkan Visi dari Kabupaten Balangan adalah :

***“Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”***

*dengan Misi*

***“Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif”***

## 1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- b. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
- c. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik

## 2. Sasaran

Sasaran target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun dari 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
- b. Meningkatnya kesetaraan gender
- c. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Meningkatnya klasifikasi desa

Tabel 2.1

**Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Startegis Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia (PPKS) yang tertangani	Meningkatnya produktifitas Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial ( PPKS )	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia (PPKS) yang tertangani	46,95%	52,95%	58,95%	64,95%	70,95%	76,95%
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IPG ( Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kesetaraan gender	IPG ( Indeks Pembangunan Gender)	92,71	92,74	92,77	92,8	92,83	92,86
				IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender)	70,77	72	73,02	74,04	75	76
				Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD	18	21	21,05	21,1	21,15	21,2
			Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,1	14	13,9	13,8	13,7	13,6
Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	2	1,9		1,8	1,7	1,6	1,5			
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Perkembangan status pembangunan desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang menuju maju dan mandiri	Meningkatnya Klasifikasi Desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju	16,88	23,38	28,57	33,77	38,96	44,16

### B. Perjanjian Kinerja (PK) 2022

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan Bupati Balangan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati



tidak dibatasi pada capaian *output* tetapi termasuk kinerja *outcome* kesinambungan setiap tahunnya.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas/ Eselon II Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produktifitas Pemelru Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka PPKS Tertangani	52,95%
2	Meningkatnya kesetaraan gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender) IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	92,74 72
3	Menurunnya angka terhadap perempuan dan anak	Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD Rasio Kekerasan terhadap perempuan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	14 1,9
4	Meningkatnya Klasifikasi Desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju	23,38%

**Perjanjian Kepala Bidang/Eselon III Tahun 2022 adalah sebagai berikut :**  
**BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan bantuan sosial	67%
		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%

**BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kompetensi/ Kapasitas SDM PPKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	78%
2	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan lansia, disabilitas, anak terlantar, korban nafza dan Wanita rawan sosial ekonomi	Persentase cakupan PPKS (lansia, disabilitas, anak terlantar, korban NAFZA dan Wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial)	100%
3	Meningkatnya kualitas makam pahlawan yang dipelihara	Persentase makam pahlawan yang terawatt	100%

**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintah Dakam pelaksanaan PUG	Jumlah Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	17,28%
3	Meningkatnya kualitas sistem data gender dan anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100%
4	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan khusus anak serta meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%
		Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100%

**BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENATAAN DESA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	80%

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA DESA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang mendapatkan biaya operasional	50%
		Persentase BUMDes yang berkembang	17,26%

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas data fakir miskin	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang divalidasi	12.000 KK
2	Tersedianya makanan bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	500 KK
3	Menyalurkan bantuan kepada PPKS	Persentase Jiwa yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial bersyarat	100%
		Jumlah rumah layak huni setelah mendapat bantuan	2 Buah
		Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	2 Kelompok
4	Meningkatnya keterampilan TAGANA setelah dibina	Jumlah anggota tagana mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	30 Orang

**Perjanjian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya penyediaan permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	600 Orang
2	Tersalurnya bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas dan lansia	Jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang mendapatkan bantuan alat bantu	96 Orang
3	Tersalurnya bantuan kepada anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dilayani	10 Orang
4	Terlaksananya bimbingan fisiki, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS (lansia, penyandang disabilitas korban NAFZA pengemis dan tuna sosial)	Jumlah PPKS(Lansia, Penyandang disabilitas korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	27 orang
5	Terlaksananya bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20 Orang
		Jumlah Wanita Rawan sosial yang mendapatkan fasilitas Pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	8 Orang

**Perjanjian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya rapat koordinasi dalam pengumpulan uang dan barang yang direkomendasikan	Jumlah rapat tentang usulan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang direkomendasikan	2 kali
2	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	8 LKS
3	Terpeliharannya makam pahlawan	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	1 Buah

**Perjanjian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemetaan lokasi perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah lokasi KAT yang dipetakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari kementerian sosial	1 Lokasi
2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	70 KK
3	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang terampil	8 TKSK
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) yang terampil	40 Orang
5	Meningkatnya kemampuan bagi penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan program keluarga harapan (PKH) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tervalidasi	9336 KK
		Jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan program keluarga (PKH) yang tervalidasi	3757 KK

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan Gugus Tugas KLA di Kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	270 Orang
		Jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	64 orang
2	Terlaksananya pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang ramah anak	21 Buah
		Jumlah pondok pesantren yang memenuhi kriteria ramah anak	1 Buah



		Jumlah masjid yang memenuhi kriteria ramah anak	5 Buah
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	80 Orang
3	Meningkatnya kualitas kader posyandu, Lembaga dan Masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Jumlah kader posyandu, Lembaga dan masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	130 Orang
4	Terbentuknya forum anak desa (FAD)	Jumlah forum anak desa yang terbentuk	5 Kelompok
5	Terlaksananya pendataan profil anak	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	2 Kecamatan
6	Meningkatnya kualitas jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	24 Orang
		Jumlah ruang laktasi	0 Buah
		Jumlah puskesmas yang terstandar ramah anak	12 buah
7	Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	200 Orang
8	Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase korban anak yang terlayani	100%
9	Terbentuknya PATBM	Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator	138 Orang

#### Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pendampingan SKPD dalam melaksanakan PPRG di Kabupaten Balangan	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	200 Orang
		Jumlah perencana/PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	50 Orang

2	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	138 Orang
3	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 Organisasi
		Jumlah penyaluran bantuan spesifik peningkatan partisipasi perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	260 Paket
		Jumlah penyaluran bantuan bakti sosial peningkatan partisipasi perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	17 Paket
4	Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	205 Orang
5	Terlaksananya penanganan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	100%

#### Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pelatihan bagi kader keluarga	Jumlah pembinaan desa TPK2D	10 Kali
		Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	15 Orang
2	Terlaksananya sosialisasi koordinasi dan advokasi penyuluhan pencegahan perkawinan anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	460 Orang
3	Terlaksananya konseling pra nikah bagi calon penganten	Jumlah klien pada PUSPAGA yang terlayani	200 Orang
4	Tersediannya data terpilah kabupaten dan data kekerasan perempuan dan anak melalui website simfoni	Jumlah data gender dan anak yang disajikan	1 dokumen
		Jumlah dokumen data gender dan anak yang lengkap dapat tersaji dengan baik	1 dokumen

		Jumlah dokumen kekerasan perempuan dan anak yang diverifikasi, jumlah dokumen data pelaporan e-kekerasan simfoni PPA yang tersaji diwebsite	12 Dokumen
--	--	---	------------

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penetapan APBDes Tepat Waktu	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu	75%
2	Terinventarisasinya asset desa	Peresntase penyampaian laporan inventaris asset desa tepat waktu	70%

**Perjanjian Kinerja JF Analis Kebijakan Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya produk hukum desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154 Desa
2	Terlaksannanya Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154 Desa
3	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang selesai penetapan batas desa	

**Perjanjian Kinerja JF Analis Kebijakan Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase aparatur desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	92%
2	Terlaksannanya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina aparatur pemerintaha desanya	154 Desa
3	Terlaksananya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah desa peserta lomba desa dengan klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	9 desa/kelurahan

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya kerjasama antar desa	Jumlah kerjasama anatar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi	1 Kerjasama
2	Terlaksananya pembangunan Kawasan perdesaan yang difasilitasi	Jumlah pembangunan Kawasan perdesaan yang difasilitasi	1 Kawasan

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemanfaatan TTG dan SDA bagi masyarakat pedesaan	Jumlah posyantek di desa	40 Desa/Kelurahan
		Jumlah KP Spams di desa	140 KP-Spams
		Jumlah Inovasi dan teknologi pedesaan yang berprestasi	3 Desa/Kelurahan
2	Meningkatnya pendapatan asli desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif yang memiliki PAD	56 Bumdes

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kader Lembaga kemasyarakatan	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	80 Desa/Kelurahan
		Jumlah Kader Posyandu yang terampil	80 Orang
		Jumlah kader posayndu yang terampil	8 LPM
		Jumlah kader PKK Tk Desa yang dibina	164 Orang
2	Meningkatnya kualitas PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165 Orang

### C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 yang terdiri dari 15 (lima belas) program sebagai berikut:

NO	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.233.864.654
2	Pemberdayaan Sosial	Rp. 496.925.000
3	Rehabilitasi Sosial	Rp.1.068.515.250
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 4.425.203.003
5	Penanganan Bencana	Rp. 559.864.400
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 59.450.000
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.016.535.000
8	Perlindungan Perempuan	Rp. 71.702.500
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 194.147.750
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 94.534.250
11	Pemenuhan Hak Anak	Rp. 256.762.750
12	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Rp. 116.942.950
13	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 2.372.080.150
14	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.371.251.000
15	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 4.331.385.750

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Tindak lanjut pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai. Selama tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan melaksanakan 15 (lima belas) program, terdiri dari 1 program penunjang urusan Sekretariat, 5 (lima) program untuk urusan sosial, 6 (enam) program untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta 3 (tiga) program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

LAKIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian indikator kinerja dan targetnya merupakan pra syarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan relasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategorisasi sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
I	91% sampai dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% sampai dengan 90%	Tinggi
III	66% sampai dengan 75%	Sedang
IV	51% sampai dengan 65%	Rendah
V	Kurang dari atau sama dengan 50%	Sangat Rendah

Dasar: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator sasaran yang tertuang dalam formulir pengukuran kinerja.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{persentase capaian}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

## 1. Capaian Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagaimana dengan urusan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 3 urusan yang diampu, sehingga dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas menunjukkan beberapa sasaran strategis. Adapun sasaran strategis yang **pertama** Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), **kedua** Meningkatnya kesetaraan gender, **ketiga** sunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan **keempat** Meningkatnya klasifikasi desa. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagai berikut:

### A. Capaian Kinerja Utama Urusan Sosial

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) indikator yang menjadi indikator kinerja utama pada urusan sosial yaitu:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagaimana tersebut secara ringkas pada tabel berikut: **Sasaran 1: Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial**

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Sosial**

Sasaran Strategis: Meningkatnya Produktivitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	116,95%	52,95	68,72	129,98	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>129,98</b>	<b>Sangat Tinggi</b>



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Indikator Kinerja “Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani” pada Renstra 2021-2026 yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki persentase capaian lebih dari 100%.

Urusan sosial merupakan urusan wajib. Bidang sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah. Saat ini kemiskinan menjadi masalah sosial dan menjadi akar berbagai permasalahan dan mempengaruhi masalah sosial lainnya. Kemiskinan dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi/situasi dimana individu atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dikarenakan tidak adanya atau rendahnya pendapatan yang diperoleh. Selain itu juga kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, bukan hanya berkaitan dengan materi (ekonomi), tetapi juga pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Oleh sebab itu dalam penanganan kemiskinan perlu kerjasama lintas sektor, bukan hanya dari sisi sosial akan tetapi dari sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, kebudayaan, serta politik. Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan pelayanan dan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan PKSK terdiri dari 26 jenis dan salah satu kriterianya adalah miskin. Kategori miskin untuk PPKS yang dapat diberikan penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar;
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tidak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil);

- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik dan air
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Mengacu dari 26 jenis PPKS tersebut salah satunya adalah PPKS fakir miskin. Menurut Kemensos pengertian dari fakir miskin adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Fakir miskin ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh sebab itu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk dalam masyarakat miskin yang sangat perlu untuk diberikan pelayanan agar meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari 26 Jenis dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah 12 jenis. Untuk Kabupaten Balangan dari 26 Jenis PPKS yang ditangani hanya 9 Jenis PPKS, dan hasil Pemuktahiran Data PPKS Tahun 2022 berjumlah 68.334 Orang disajikan pada table berikut.

**Tabel 3.2**  
**Data PPKS Kabupaten Balangan**

No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Anak Terlantar	191 Orang
2	Anak yang berhadapan Dengan Hukum	18 Orang
3	Lanjut Usia	4.442 Orang
4	Penyandang Disabilitas	1.240 Orang
5	Korban bencana Alam	22 Orang
6	Korban bencana Sosial	146 Orang
7	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	54 Orang
8	Fakir Miskin	60.585 Orang
9	Komunitas Adat Terpencil	1.636 Orang
	Jumlah	68.334 Orang

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan fenomena umum dikota-kota dan semakin berkembang termasuk dapat ditemui di wilayah Kabupaten Balangan. PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok

masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial.

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Eselon II) “Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani” realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 68,72% dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 52,95% sudah tercapai sebesar lebih dari 100%. Pada tahun 2022 jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 46.958 Orang dari 9 Jenis PPKS dibandingkan dengan populasi jumlah PPKS di Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebanyak 68.334 Orang sudah tercapai sebesar 68,72% PPKS yang tertangani, sehingga hal tersebut mencapai target RPJMD Kabupaten Balangan sebesar 52,95%. IKU “Angka PPKS yang tertangani” diukur dengan rumus:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas terkait urusan Sosial adalah “Persentase PPKS yang Tertangani” diukur dengan rumus:

$$\text{Persentase PPKS yang tertangani} = \frac{\sum \text{Jumlah PPKS dibantu}}{\sum \text{Populasi PPKS di Balangan}} \times 100\%$$

**Tabel 3.3**  
**Jumlah PPKS dan Jumlah PPKS yang tertangani**  
**di Kabupaten Balangan Tahun 2022**

No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PPKS	Jumlah PPKS yang Tertangani
1	Anak Terlantar	191 Orang	34 Orang
2	Anak yang berhadapan Dengan Hukum	18 Orang	18 Orang
3	Lanjut Usia	4.442 Orang	1.213 Orang
4	Penyandang Disabilitas	1.240 Orang	658 Orang
5	Korban bencana Alam	22 Orang	22 Orang
6	Korban bencana Sosial	146 Orang	146 Orang
7	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	54 Orang	32 Orang

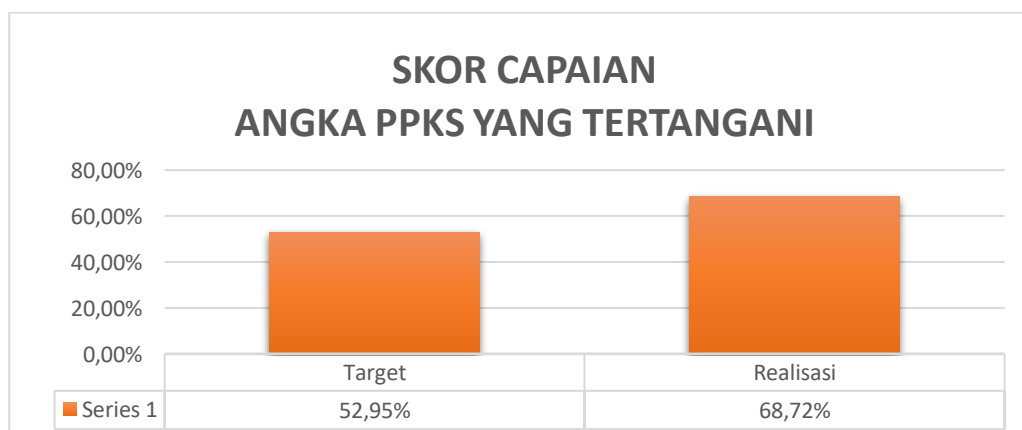
<b>8</b>	Fakir Miskin	60.585 Orang	44.685 Orang
<b>9</b>	Komunitas Adat Terpencil	1.636 Orang	150 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>68.334 Orang</b>	<b>46.958 Orang</b>

## 2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Eselon II) “Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani” pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 terealisasi sebesar 54,91% sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 68,72% dan persentase capaian pada tahun 2022 lebih dari dari 100%.

## 3) Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Memperhatikan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa capaian Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sasaran “Meningkatnya produktivitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial” pada tahun 2022 dengan Indikator Kinerja “Angka PPKS yang tertangani” ditargetkan 52,95% dari populasi PPKS di Kabupaten Balangan yaitu sebanyak 68.334 Orang sampai akhir tahun 2022 teralisasi sebanyak 68,72% dengan capaian kinerja lebih dari 100%. Capaian indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 Program dan 7 Kegiatan yang di dukung oleh APBD Kabupaten sebesar Rp.6.550.507.653,- ( Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Lima Tiga Rupiah). Indikator Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) “ Angka PPKS yang tertangani” pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 68,72%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebanyak 54,91%, ada kenaikan sebesar 18,73%.



**a. Upaya yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022, capaian kinerja untuk indikator “Angka PPKS yang tertangani” tercapai sebesar 68,72% sehingga persentase capaian kinerja lebih dari 100%. Upaya-upaya yang telah dilakukan:

- Memberikan pelayanan kepada anak terlantar. Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orangtua atau pengasuh. Jumlah anak terlantar di Kabupaten 191 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya Pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orangtuanya atau keluarganya. Tahun 2022 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sebanyak 34 Orang yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan Pelatihan Keterampilan dan mendapatkan pembinaan dan fasilitas pendampingan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPR SAR) Mulia Satria atau dengan capaian 17,80%. Dalam memberikan pelayanan terhadap anak-anak yang terlantar terutama dari belum terpenuhinya akses Pendidikan yang mereka peroleh, pihak dinas memberikan pelayanan dengan bekerjasama dengan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar bisa menjadi perpanjangan tangan pihak Kabupaten untuk dapat melakukan penelusuran terhadap anak terlantar yang terdapat di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Selain itu juga langkah yang dilakukan oleh pihak dinas dengan lahirnya inovasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat melaporkan secara segera terkait pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada dilingkungan mereka tanpa perlu datang ke Dinas. Inovasi tersebut diberi nama Layar Sibalang atau Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan. Peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lainnya memberikan dukungan berupa uang saku dan pemberian laptop sebanyak 7 (tujuh) buah terhadap anak-anak yang mendapatkan akses Pendidikan dan tinggal di panti tersebut.

- Memberikan layanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 Tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orangtua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berjumlah 18 Orang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memberikan pendampingan dan membantu untuk dapat menyelesaikan kasus hukum tersebut, yang mana berupa kasus pelecehan seksual, perilaku menyimpang, dan laka lantas. Dalam memberikan pendampingan tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh Pekerja Sosial (Sakti Peksos).
- Memberikan layanan terhadap Lanjut Usia Terlantar. Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk Kabupaten Balangan Lanjut Usia terlantar 4.442 Orang dan yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan berupa pemberian sembako kepada 600 orang dari pemerintah daerah, 306 orang dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan 223 Orang dari Kementerian Sosial dan total yang mendapatkan bantuan sembako sebanyak 1.129 orang. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah pemberian alat bantu lansia yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat lansia sebanyak 48 Buah dari Pemerintah Daerah dan 36 Buah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan total orang yang mendapatkan bantuan alat bantu sebanyak 84 orang. Sehingga lansia yang mendapatkan bantuan berupa sembako dan alat bantu lansia sebanyak 1.213 orang dengan capaian 27,31%.
- Memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma. Jumlah

penyandang disabilitas di Kabupaten Balangan yaitu 1.240 Orang, selanjutnya layanan yang diperoleh berupa bantuan alat disabilitas yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kruk, dan tongkat netra yang mana 48 Buah berasal dari pemerintah daerah dan 10 Buah berasal dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya layanan yang diberikan berupa bantuan permakanan sebanyak 600 orang yang berasal dari pemerintah daerah. Sehingga penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan berupa bantuan alat bantu dan permakanan berjumlah 658 orang dengan capaian 53,06%.

- Memberikan layanan kepada korban bencana alam. Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor, dan puting beliung di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 berjumlah 6 Kepala Keluarga dan 22 Orang dan semuanya mendapatkan bantuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam memberikan pelayanan ini didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu Tagana Kabupaten Balangan.
- Memberikan layanan korban bencana sosial. Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 berjumlah 44 Kepala Keluarga dengan 22 orang semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam memberikan pelayanan ini didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu Tagana Kabupaten Balangan.
- Memberikan layanan terhadap rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena fakta kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya, di Kabupaten balangan berjumlah 54

Orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 23 Orang mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pelatihan keterampilan di panti sosial bina wanita dan 9 orang menerima bantuan usaha ekonomi produktif sehingga jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang dibantu sebanyak 32 orang.

- Memberikan layanan terhadap fakir miskin. Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan jumlah fakir miskin di Kabupaten Balangan 60.585 Orang dan yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari Rehab Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yaitu 2 Buah dari Pemerintah Daerah dan 4 Buah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 2 Buah dari Pemerintah Daerah dan 1 Buah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 14.748 Jiwa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, 26.676 Jiwa mendapatkan bantuan sembako/BPNT, 2.380 jiwa mendapatkan Bantuan BLT BBM, selanjutnya usaha ekonomi produktif sebanyak 15 orang dari pemerintah daerah dan 3 orang yang berasal dari bantuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Bantuan Santunan Kematian kepada 854 orang, sehingga jumlah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin sebanyak 44.685 jiwa dengan capaian 73,75%.
- Memberikan layanan kepada Komunitas adat terpencil (KAT). Komunitas Adat Terpencil merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, di Kabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong yaitu Desa Marajai yang berjumlah sekitar 1.636 jiwa Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu pendampingan terkait sosialisasi komunitas adat terpencil, memberikan pendampingan, pembelian peralatan untuk stimulan sehingga tersedianya sebuah lokasi dan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh komunitas adat terpencil tersebut



kepada sebanyak 54 Kepala Keluarga dengan jumlah 150 Orang dengan capaian 9,17%

**b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu:

- Keterbatasan dari Sumber Daya Manusia yang membidangi kesejahteraan sosial sehingga kurang seimbang dengan banyaknya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya dalam ketersediaan data dimana lambatnya data yang terbaru tersedia
- Belum berjalan secara optimal dalam kerjasama yang dijalin dengan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Balangan dalam hal keaktifan dari masing-masing PSKS.
- Kelembagaan yang bergabung dengan urusan lainnya sehingga masih belum optimalnya dalam pelaksanaan penanganan PPKS dikarenakan beban dinas yang besar tidak sebanding dengan dukungan secara materil baik berupa anggaran terutama dalam pemenuhan kegiatan memberikan layanan kepada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan.
- Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan layanan kedaruratan berupa kendaraan khusus rehabilitasi sosial dasar diluar panti serta
- Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan Sumber daya Manusia yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam memberikan layanan dukungan psikososial setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana baik alam dan sosial.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait hambatan yang dihadapi yaitu:

- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang telah tersedia dengan menyiapkan rencana kegiatan yang terjadwal agar memudahkan pelaksanaan kegiatan serta melakukan rapat monitoring dan evaluasi bulanan.

- Menyiapkan surat keputusan kepala dinas terkait penunjukkan operator dalam penyediaan data yang terbaru dan menjalin komunikasi dengan pilar-pilar agar dapat menyampaikan data secara akurat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) agar lebih baik dan mantap dalam memberikan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Selain itu perlunya dilakukan evaluasi terkait keaktifan setiap triwulan.
- Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi baik lintas organisasi maupun dengan urusan yang ditangani baik dengan Provinsi dan Pusat agar dapat terjalinnya hubungan yang baik sehingga harapannya dapat memberikan dukungan baik secara moril dan materil sehingga pemberian pelayanan terhadap PPKS dapat ditingkatkan dan Indikator SPM yang belum dapat dilakukan secara optimal dapat menjadi perhatian dan pemenuhan SPM bidang sosial.

#### **d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Percapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4) Program Penanganan Bencana

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai sasaran strategis urusan sosial dibantu oleh 2 (dua) Orang Kepala Bidang yaitu Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Bencana Alam dan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.

#### **3.2.1.1 Eselon III (Kabid Perlindungan, Jaminan Sosial dan Bencana Alam)**

##### **Pencapaian Kinerja**

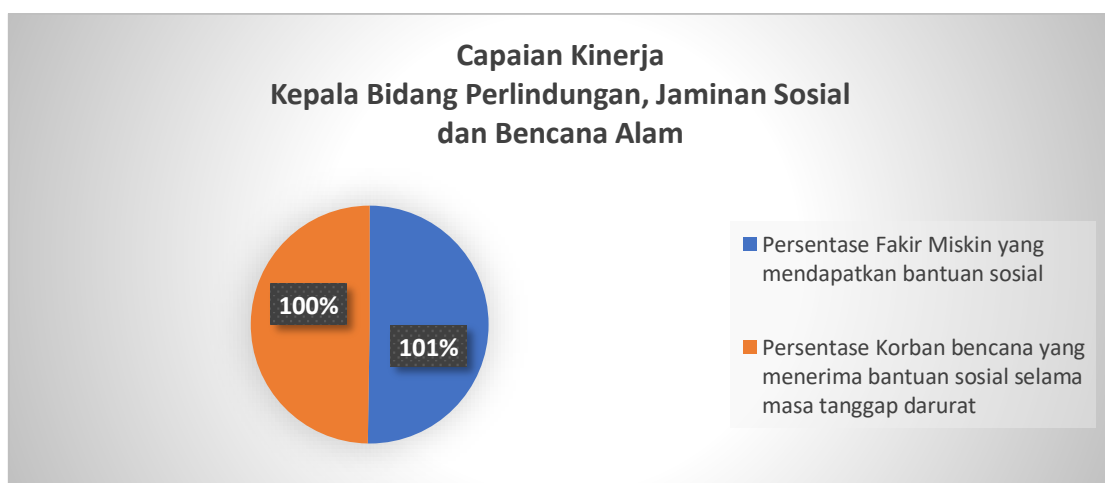
Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Bencana Alam melaksanakan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menangani beberapa jenis PPKS diantaranya yaitu Korban

Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang merupakan keluarga miskin.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Bencana Alam menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Bencana Alam. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Bencana Alam Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Bencana Alam Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan bantuan sosial	67%	68%	101%
		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%



Bedasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Sasaran Startegis “Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial” dengan Indikator “Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial” pada tahun ini realisasi sebesar 68% dari target yang dibuat sebesar 67% sehingga persentase capaian kinerja 101%. Selanjutnya untuk Indikator “Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat” memiliki realisasi 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Pada Indikator kinerja “Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial” tahun 2022 terealisasi lebih dari 100% hal tersebut karena pada tahun 2022 terjadinya peningkatan penyaluran bantuan yang pemerintah pusat berikan melalui Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Sembako/BPNT. Dimana Jumlah Fakir Miskin yang terdapat di Kabupaten Balangan adalah 60.585 Jiwa. Sedangkan fakir miskin yang telah mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2022 melalui program keluarga harapan dan bantuan sembako/bpnt berjumlah 41.424 orang. Hal tersebut yang menyebabkan realisasi dari indikator persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial melebihi target.

Sedangkan untuk Indikator Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2022 realiasi yaitu 100%. Hal tersebut dikarenakan peristiwa bencana alam dan sosial merupakan sebuah kondisi yang bisa disebut *unpredictable*, setiap tahunnya bisa ada atau bahkan tidak ada sama sekali. Untuk tahun 2022 jumlah kepala keluarga yang terdampak dari bencana alam berjumlah 6 Kepala Keluarga dengan jumlah 22 Jiwa. Berdasarkan jumlah dari tahun 2022 ini sangat berbeda jauh dengan jumlah orang yang terdampak bencana alam pada tahun 2021. Pada tahun 2022 peristiwa bencana alam yang terdapat di Kabupaten Balangan tidak begitu signifikan dari segi volume waktu. Untuk Bencana Sosial jumlah masyarakat yang terdampak peristiwa tersebut 44 KK dengan 146 Jiwa, bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 yaitu terjadinya kebakaran rumah. Untuk para korban baik bencana alam dan sosial pada tahun 2022 telah mendapatkan bantuan berupa penyediaan makanan, dan bantuan sosial lainnya.

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kedua indikator diatas, bahwa telah disalurkan bantuan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2022.



*Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sembako/BPNT*







*Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat*

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan kedua indikator diatas, tentu dalam pelaksanaan terdapat hambatan, namun yang perlu diketahui karena bantuan sosial dalam hal ini berasal dari pemerintah pusat tentu tidak begitu mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi secara penuh dalam pencapaian kinerja karena batuan tetap akan diberikan, namun kendalanya dari segi administrasi dan teknis dalam penyaluran bantuan dilapangan karena dalam penyalurannya melalui Bank yang telah ditujuk dan Kantor Pos.

Mengacu dengan kendala diatas rencana tindak lanjut yang dilakukan akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sektor yang telah ditunjuk agar mencari solusi dan membuat langkah-langkah yang lebih baik agar dalam penyalurannya dapat dilaksanakan lebih efektif.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan: Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

2. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan , Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan dan

- Kegiatan: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Dalam mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Kepala Bidang, Jaminan Sosial dan Bencana Alam dibantu oleh 1 (Satu) JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2022, berikut hasil capaian kinerja;

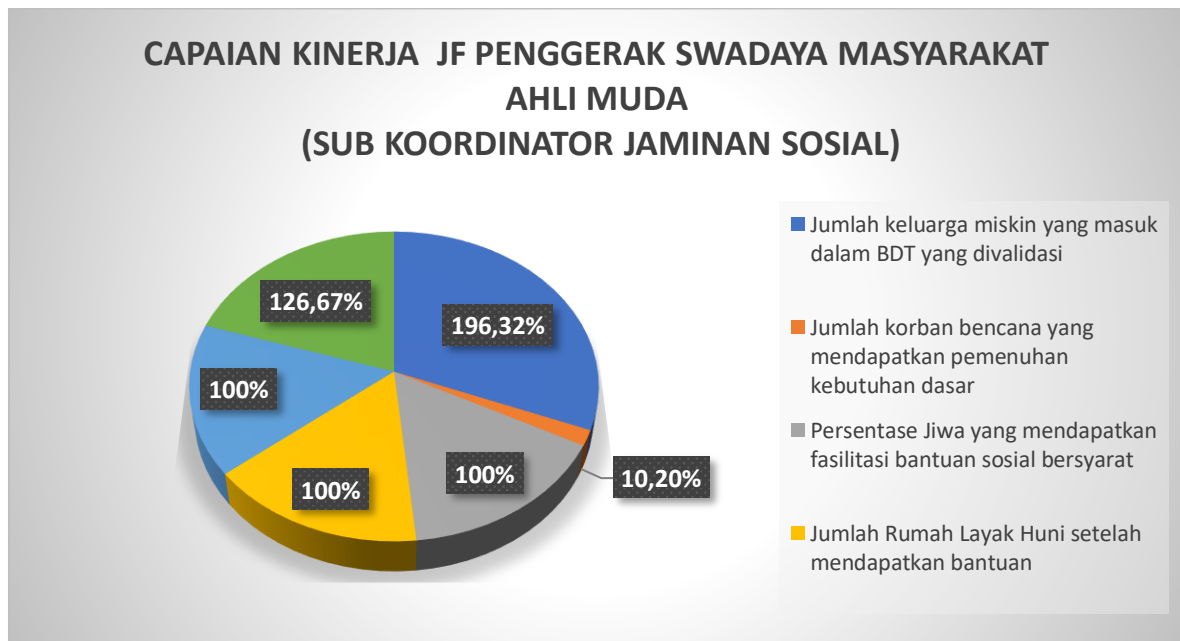
#### A. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Bencana Alam dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas data fakir miskin	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang divalidasi	12.000 KK	22.577 KK	196,32%
2	Tersedianya makanan bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	500 KK	51 KK	10,20%
3	Menyalurkan bantuan kepada PPKS	Persentase Jiwa yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial bersyarat	100%	100%	100%
		Jumlah Rumah Layak Huni setelah mendapatkan bantuan	2 Buah	2 Buah	100%
		Jumlah kelompok yang	2 Kelompok	2 Kelompok	100%

		mendapatkan bantuan KUBE			
4	Meningkatnya keterampilan TAGANA setelah dibina	Jumlah anggota tagana mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	30 Orang	38 Orang	126,67%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>105,53%</b>



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi dari masing-masing indikator ada yang <100%, dan >100%. Indikator Kinerja “Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang divalidasi” realisasi kinerja tahun 2022 sebanyak 22.577 KK dari target yang ditetapkan sebanyak 12.000 KK dengan persentase capaian lebih dari 100%. Pada Indikator Kinerja “Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar” realisasi sebanyak 51 KK dari target yang ditetapkan sebanyak 500 KK sehingga persentase capaian 10,2%. Selanjutnya Indikator Kinerja “Persentase Jiwa yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial bersyarat” dengan realisasi 100% dari target ditetapkan 100% sehingga persentase capaian 100%. “Indikator Kinerja Jumlah Rumah Layak Huni setelah mendapatkan bantuan” dengan realisasi sebanyak 2 Buah dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Buah



sehingga persentase capaian 100%. Indikator Kinerja “Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE” dengan realisasi sebanyak 2 kelompok dengan target yang ditetapkan 2 Kelompok sehingga persentase capaian 100%, dan Indikator Kinerja “Jumlah anggota tagana mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan” dengan realisasi sebanyak 38 Orang dari target yang ditetapkan sebanyak 30 Orang sehingga persentase capaian kinerja lebih dari 100%.

Mengacu pada penjelasan diatas, pada indikator Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang divalidasi, realisasi kinerja tahun 2022 adalah 22.577 Kepala Keluarga dari target 12.000 KK sehingga capaian >100%. Hal tersebut tentu tidak lepas dari hasil koordinasi dan kerjasama yang pihak Dinas lakukan baik dengan pihak pemerintah desa dan pontesi sumber kesejahteraan sosial dalam hal ini tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK). Selain itu juga dalam pencapaian indikator tersebut kami melakukan rapat untuk tujuan terciptanya persamaan persepsi sehingga dalam proses validasi dapat dilakukan secara cepat dan dapat menghasilkan data yang akurat.

Selanjutnya indikator “Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar” realisasi kinerja tahun 2022 adalah 51 Kepala Keluarga dari target 500 Kepala Keluarga sehingga persentase capaian kinerja 10,2%. Melihat dari persentase capaian kinerja yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut karena pada saat menentukan target untuk target 2022 mengacu pada realisasi pada tahun 2021 dimana jumlah korban bencana pemenuhan kebutuhan dasar dari korban bencana alam yaitu 8.401 Kepala Keluarga dengan 26.736 Jiwa dan untuk korban bencana sosial sebanyak 15 kepala keluarga dengan 54 jiwa. Berdasarkan data yang telah disajikan tentu dapat dilihat pada tahun 2021 bencana alam yang terjadi dibalangan sering terjadi dan banyak masyarakat yang terkena dampak Sedangkan pada tahun 2022 intensitas dari bencana alam yang ada di Kabupaten Balangan tidak begitu sering terjadi sehingga tidak banyak korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.

Indikator kinerja yang ketiga “Persentase Jiwa yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial bersyarat” dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% sehingga persentase capaian kinerja 100%. Dalam penentuan target yang melihat dari indikator yang telah ditetapkan. Sehingga dalam setiap jiwa yang memerlukan bantuan sosial bersyarat harus mendapatkan fasilitasi dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pemberian pelayanan minimal kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang keempat “Jumlah Rumah Layak Huni setelah mendapatkan bantuan” dengan realisasi sebanyak 2 Buah dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Buah sehingga persentase capaian kinerja 100%. Kegiatan tersebut merupakan bantu intervensi dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Balangan. Bentuk yang dilakukan adalah melakukan bedah rumah terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memenuhi kualifikasi salah satunya orang tersebut harus masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial dan dikategorikan tidak mampu.

Indikator kinerja yang kelima “Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE” dengan realisasi sebanyak 2 kelompok dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Kelompok sehingga persentase capaian kinerja 100%. Kegiatan tersebut merupakan bentuk intervensi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan membuat sebuah kelompok yang tujuannya untuk dapat berdaya sehingga dapat berwirausaha dan dari usaha yang dibentuk dapat menghasilkan dan bisa menjadi sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dari masing-masing anggota kelompok tersebut.

Indikator kinerja yang kelima “Jumlah anggota tagana mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan” dengan realisasi sebanyak 38 Orang dari target 30 Orang, sehingga persentase capaian kinerja 100%. Realisasi tersebut melebihi target dikarenakan pada tahun berjalan adanya penambahan jumlah anggota tagana yang ada di Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu dengan memenuhi indikator yang telah ditetapkan telah dilakukan pelatihan sebanyak 38 anggota taganan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan kebencanaan sehingga potensi sumber kesejahteraan sosial dapat secara

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

kualitas mengalami peningkatan dan harapannya dapat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada saat terjadinya bencana.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan enam indikator diatas, di Kabupaten Balangan pada tahun 2022:



*Kegiatan dalam melakukan pemuktakiran data dan Validasi Data BDT*





PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



*Kegiatan Penyaluran Bantuan Korban Bencana*



*Kegiatan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni setelah mendapatkan bantuan*



*Kegiatan Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama*



*Kegiatan anggota tagana mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan*

Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda ( Sub Koordinator Jaminan Sosial ) adalah :

1. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
2. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
3. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Penyediaan Makanan
5. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

### **3.2.1.2 Eselon III (Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial)**

#### **Pencapaian Kinerja**

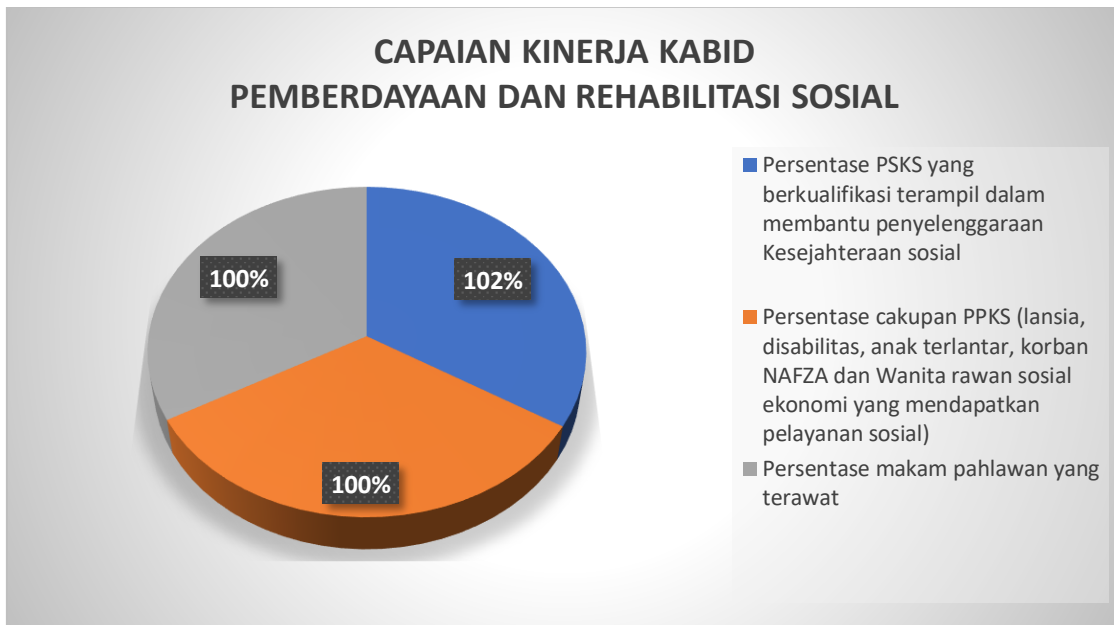
Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari kata pemberdayaan yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan dalam pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pengumpulan uang dan sumbangan, serta kelompok unsur pengelolaan taman makam pahlawan. Selanjutnya terkait rehabilitasi sosial melaksanakan kebijakan teknis reahabilitasi anak, rehabilitasi penyandang disabilitas dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang. Dalam urusan rehabilitasi sosial ini menangani beberapa jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yaitu anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantarm tuna sosial, dan kroban perdagangan orang.

Dalam perjanjian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kompetensi/ Kapasitas SDM PPKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	78%	79,30%	102%
2	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan lansia, disabilitas, anak terlantar, korban nafza dan Wanita rawan sosial ekonomi	Persentase cakupan PPKS (lansia, disabilitas, anak terlantar, korban NAFZA dan Wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial)	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas makam pahlawan yang dipelihara	Persentase makam pahlawan yang terawat	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>106,67%</b>





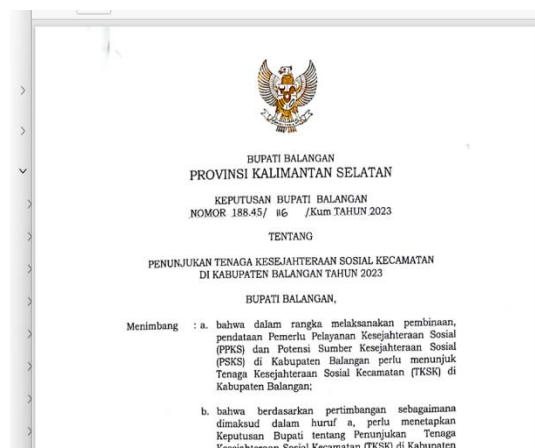
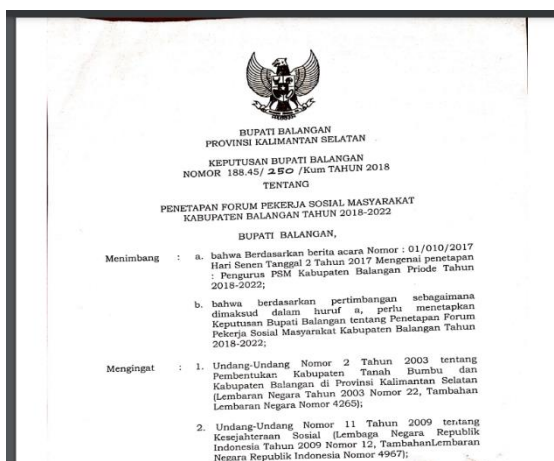
Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan terdapat 3 (tiga) Sasaran “Meningkatnya kompetensi/kapasitas SDM PPKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” dengan indikator persentase PKSK yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial’. Sasaran kedua “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan lansia, disabilitas anak, terlantar, korban nafza dan wanita rawan sosial dengan Indikator Kinerja Persentase cakupan PPKS (lansia, disabilitas, anak terlantar, korban NAFZA dan Wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial). Sasaran Ketiga Meningkatkan kualitas makam pahlawan yang dipelihara dengan indikator persentase makam yang terawat.

Indikator Pertama “Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan Kesejahteraan sosial” realisasi 79,30% dari target yang ditetapkan 78% dengan persentase capaian kinerja 102%. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK) terdiri dari 12 Jenis. Jenis PSKS yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan meliputi Pekerja Sosial Profesional (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Satuan Bhakti Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha untuk jumlah PSKS di Kabupaten sebanyak 2.551 orang dengan 9 Jenis PSKS.

Indikator kedua “Persentase cakupan PPKS (lansia, disabilitas, anak terlantar, korban NAFZA dan Wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial)” dengan realisasi 100% dengan target 100% sehingga persentase capaian kinerja 100%. Penentuan target pada tahun 2022 berdasarkan indikator yang ingin dicapai dalam hal ini berkaitan dengan Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan perseorang, keluarga, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitasm atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani. Berkaitan dengan hal tersebut PPKS merupakan sasaran dari kegiatan Standar Pelayanan Minimal yang mana dalam pelaksanaannya dan pemenuhannya harus 100%.

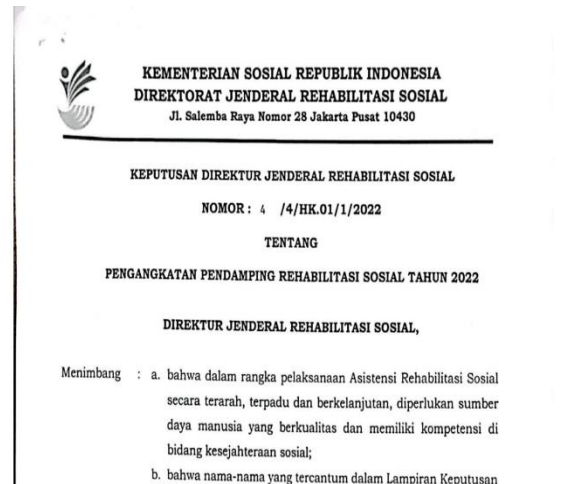
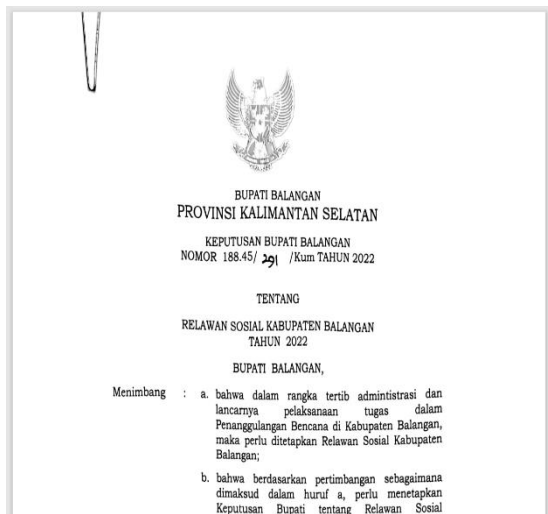
Indikator ketiga “Persentase makam pahlawan yang terawat” dengan realisasi 100% dengan target 100% sehingga persentase capaian kinerja 100%. Dalam hal ini Kabupaten Balangan memiliki 1 Lokasi Taman Makam Pahlawan yang berlokasi Desa Teluk Bayur di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Untuk makam yang ada di lokasi tersebut terdapat 2 Buah dan telah dilakukan perawatan setiap bulannya, hal tersebut didukung dengan adanya petugas kebersihan makam.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan tiga indikator diatas, di Kabupaten Balangan Tahun 2022:





PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Kegiatan Koordinasi dengan LKS





PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



*PPKS (lansia, disabilitas, anak terlantar, korban nafza, dan wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial)*



*Makam Pahlawan Kabupaten Balangan*

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan tiga indikator diatas, tentu dalam pelaksanaan terdapat hambatan dimana untuk data dari masing-masing jenis potensi sumber kesejahteraan sosial masih perlu dilakukan pembaharuan, belum adanya rencana kegiatan yang sistematis dalam peningkatan kapasitas sehingga memerlukan dukungan baik secara moril dan materil, serta konsep dari hadirnya potensi sumber kesejahteraan sosial masih belum banyak yang mengerti.

Mengacu dengan kendala diatas rencana tindak lanjut yang dilakukan akan dilakukan pembaharuan data agar lebih akurat dan dilakukan persamaan persepsi terkait konsep, serta tujuan dari adanya potensi sumber kesejahteraan sosial, selain itu dalam rencana kerja tahun selanjutnya perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas atau kemampuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial.

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan: Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan sub kegiatan: Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

## 3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Kepala Bidang, Jaminan Sosial dan Bencana Alam dibantu oleh 3 (tiga) JF Penyuluh Sosial Ahli Muda. Sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2022, berikut hasil capaian kinerja :

#### A. Perjanjian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial)

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya penyediaan permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	600 Orang	600 Orang	100%
2	Tersalurnya bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas dan lansia	Jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang mendapatkan bantuan alat bantu	96 Orang	96 Orang	100%
3	Tersalurnya bantuan kepada anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dilayani	10 Orang	14 Orang	140%
4	Terlaksananya bimbingan fisiki, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS (lansia,	Jumlah PPKS ( Lansia, Penyandang disabilitas korban NAFZA, pengemis dan	27 orang	22 orang	81%

	penyandang disabilitas korban NAFZA pengemis dan tuna sosial)	tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi			
5	Terlaksananya bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20 Orang	7 Orang	35%
		Jumlah Wanita Rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	8 Orang	23 Orang	288%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>124%</b>



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) sasaran. Sasaran pertama “Terpenuhinya penyediaan permakanan” dengan 1 (satu) Indikator Kinerja “Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya”. Sasaran kedua “Tersalurkanya bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas dan lansia” dengan 1 (satu) indikator “Jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang mendapatkan bantuan alat bantu”. Sasaran ketiga “Tersalurkanya bantuan kepada anak terlantar” dengan 1 (satu) indikator “Jumlah anak terlantar yang dilayani”. Sasaran keempat “Terlaksananya bimbingan fisiki, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS (lansia, penyandang disabilitas korban NAFZA pengemis dan tuna sosial)” dengan 1 (satu) indikator “Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi. Sasaran kelima “Terlaksananya bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator

“Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dan “Jumlah Wanita Rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan”.

Mengacu dari tabel diatas, Indikator Pertama “Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” realisasi kinerja 600 Orang dari target yang ditetapkan 600 Orang sehingga persentase capaian kinerja 100%. Dalam mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu dengan memberikan bantuan permakanan bagi lanjut usia berupa bantuan sembako . Penyerahan sembako pada saat acara Hari Jadi kabupaten Balangan sebanyak 200 Orang, HUT RI sebanyak 200 Orang, dan Menyambut Bulan Suci Ramadhan 200 Buah.

Indikator Kedua “Jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang mendapatkan bantuan alat bantu” realisasi kinerja 96 Buah dari target yang ditetapkan 96 Buah sehingga persentase capaian kinerja 100%. Pemberian alat bantu bagi lansia dan disabilitas terdiri dari alat bantu tongkat lansia, walker, kursi roda, tongkat kruk, alat bantu dengar. Penyaluran bantuan alat bantu tersebut terdiri dari 48 Buah untuk disabilitas dan 48 Buah untuk lanjut usia. Pemberian alat bantu disesuaikan kebutuhan dari para pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS).

Indikator Ketiga “Jumlah anak terlantar yang dilayani” realisasi 14 Orang dari target yang ditetapkan 10 Orang sehingga persentase capaian kinerja 100%. Anak-anak yang terlantar diberikan pelayanan dari pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan difasilitasi untuk diantar Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Remaja yang ada di Banjarbaru dengan harapan anak-anak tersebut dapat mendapatkan pelayanan terutama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Indikator Keempat “Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi realisasi 22 orang dari target yang ditetapkan 27 orang dengan persentase capaian kinerja 81%. Dalam hal pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan fasilitas untuk memberikan layanan untuk melakukan assignment terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan apabila dapat memenuhi syarat dan ketentuan



yang telah ditetapkan maka dapat diberikan layanan untuk dapat dilakukan pengantaran ke Panti sehingga para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tersebut dapat mendapatkan peningkatan kapasitas maupun keterampilan dengan harapan ketika sudah kembali kepada lingkungan masyarakat akan lebih percaya diri, dan hidupnya akan lebih berdaya di masa yang akan datang karena ketika berada di panti telah dibekali oleh keterampilan-keterampilan.

Indikator Kelima “Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” realisasi 7 orang dengan target yang ditetapkan 20 Orang sehingga persentase capaian 81%. Anak telantar yang diberikan fasilitasi oleh pihak Dinas Sosial, segi pendidikannya terlantar dimana tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dimana untuk dapat terpenuhinya kebutuhan dasarnya diberikan fasilitas dan pelayanan ke Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPR SAR) di Banjarbaru.

Indikator Keenam “Jumlah Wanita Rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan” realisasi 23 Orang dari target yang ditetapkan 8 orang sehingga persentase capaian kinerja 288%. Wanita rawan sosial ekonomi merupakan wanita dewasa yang berusia .15 tahun ke atas baik, belum menikah, sudah menikah atau janda yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan wanita tersebut merupakan kepala rumah tangga, kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari Pendidikan yang pernah ditempuh, karena pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir individu. Pada tahun 2022 wanita rawan sosial yang dapat diberikan pelayanan dan fasilitasi oleh pihak Dinas dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut juga karena adanya kesadaran dari unsur masyarakat yang memberikan informasi terkait kondisi dan latarbelakang dari wanita rawan sosial tersebut sehingga mereka mendapat pelayanan dari pemerintah daerah untuk dapat dikirim kepanti yang bertujuan agar mereka mendapatkan Pendidikan disana sehingga mereka akan memiliki keahlian dan peningkatan kemampuan dengan harapan setelah keluar dari panti mereka dapat melanjutkan kehidupannya, bisa berdaya, dan dapat meningkatkan pendapatan dari masing-masing pribadi.



Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan 6 (enam) indikator diatas di Kabupaten Balangan Tahun 2022:



*Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Disabilitas dan Lansia*



*Penyerahan Alat Bantu untuk Lansia dan Disabilitas*



PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



*Fasilitasi Pengantaran serta Kunjungan ke Pantu Rehabilitasi Perlindungan Anak*



*PPKS yang Terasilitasi di Pantu Rehabilitasi*

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

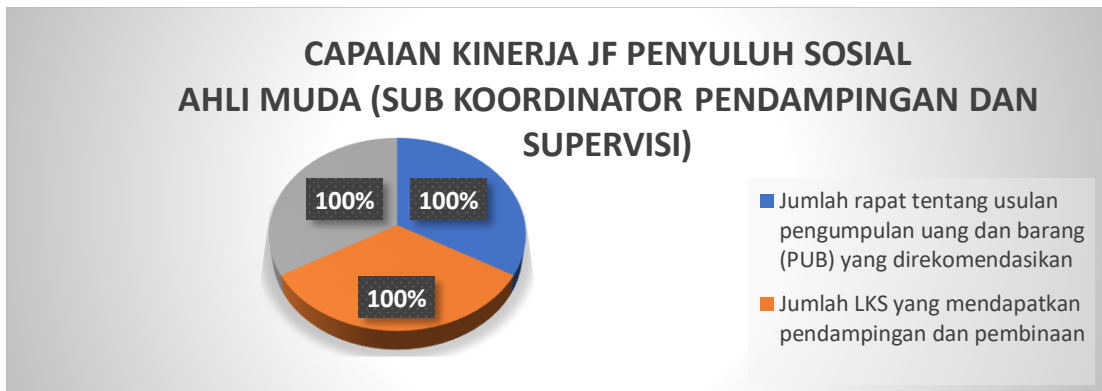
1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

**B. Perjanjian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pendampingan dan Supervisi)**

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda**  
**(Sub Koordinator Pendampingan dan Supervisi)**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya rapat koordinasi dalam pengumpulan uang dan barang yang direkomendasikan	Jumlah rapat tentang usulan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang direkomendasikan	2 kali	2 kali	100%
2	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	8 LKS	8 LKS	100%
3	Terpeliharannya makam pahlawan	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	1 Buah	1 Buah	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100%</b>



Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, tentang capaian kinerja JF penyuluh sosial ahli Muda terdapat 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Sasaran pertama “Terlaksananya rapat koordinasi dalam pengumpulan uang dan barang yang direkomendasikan” dengan indikator kinerja “ Jumlah rapat tentang usulan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang direkomendasikan”. Sasaran kedua “Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan” dengan indikator kinerja “Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan”. Sasaran Ketiga “ Terpeliharanya makam pahlawan” dengan Indikator kinerja Jumlah makam pahlawan yang dipelihara”. Dapat diketahui bawa persentase capaian kinerja untuk ketiga indikator tersebut 100%.

Indikator yang pertama “Jumlah rapat tentang usulan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang direkomendasikan” realisasi kinerja 2 Kali dengan target yang ditetapkan 2 Kali sehingga persentase capaian 100%. Indikator yang kedua “Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan” realisasi 8 LKS dari target yang ditetapkan 8 LKS sehingga persentase capaian 100%.Indikator Ketiga “Jumlah makam pahlawan yang dipelihara” realisasi 1 Buah dari target yang ditetapkan 1 Buah sehingga persentase capaian 100%.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan 3 (tiga) indikator diatas di Kabupaten Balangan Tahun 2022:





*Rapat Koordinasi dan Pendampingan dengan LKS*



*Makam Pahlawan yang Terawat serta Pemberian Tali Asih Kepada Veteran dan Keluarga*

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2. Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

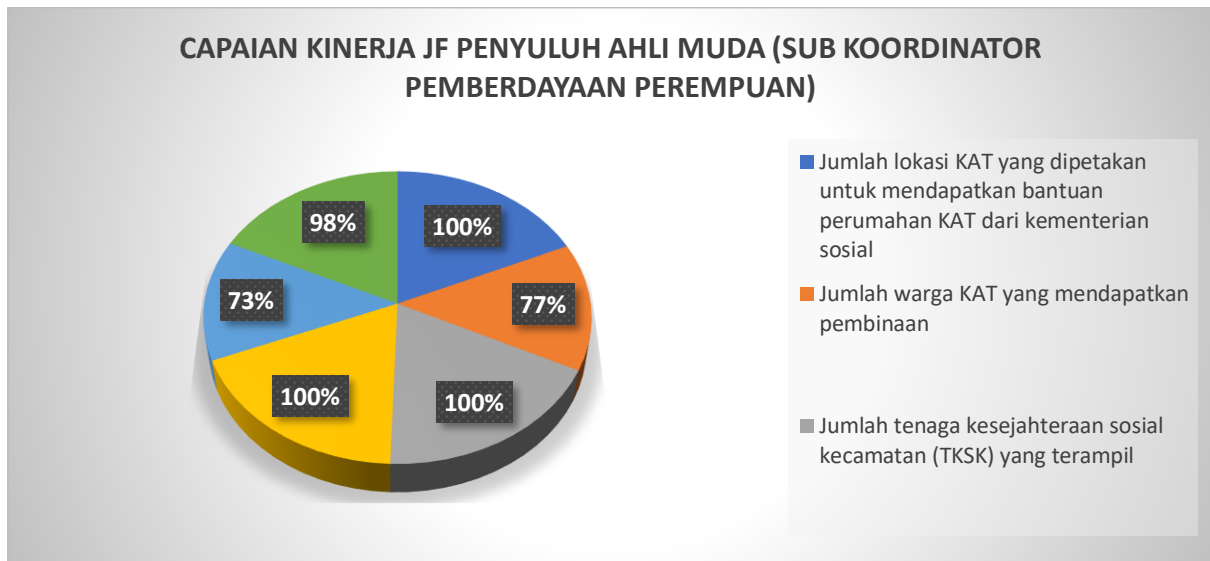
### C. Perjanjian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja JF Penyuluh Sosial Ahli Muda**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya pemetaan lokasi perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah lokasi KAT yang dipetakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari kementerian sosial	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	70 KK	54 KK	77%
3	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang terampil	8 TKSK	8 TKSK	100%
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) yang terampil	40 Orang	40 Orang	100%
5	Meningkatnya kemampuan bagi penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan program keluarga harapan (PKH) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tervalidasi	9336 KK	6859 KK	73%

		Jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan program keluarga (PKH) yang tervalidasi	3757 KK	3687 KK	98%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>91,33%</b>



Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, tentang capaian kinerja JF penyuluh sosial ahli Muda terdapat 5 (lima) Sasaran dan 6 (enam) indikator. Sasaran pertama “Terlaksananya pemetaan lokasi perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT)” dengan Indikator Kinerja “Jumlah lokasi KAT yang dipetakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari kementerian sosial”. Sasaran kedua “Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT” dengan Indikator Kinerja “Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan”. Sasaran ketiga “Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Sasaran keempat “Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)” dengan indikator kinerja “Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) yang terampil”. Sasaran kelima “Meningkatnya kemampuan bagi penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan program keluarga harapan (PKH) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya” dengan indikator kinerja “Jumlah keluarga fakir miskin yang

diberi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tervalidasi” dan “Jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan program keluarga (PKH) yang tervalidasi”.

Indikator pertama “Jumlah lokasi KAT yang dipetakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari kementerian sosial” realisasi kinerja 1 Lokasi dengan target yang ditetapkan 1 Lokasi dengan persentase capaian kinerja 100%. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Komunitas Adat Terpencil adalah orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan atau rentan sosial ekonomi. Pada tahun 2022 lokasi yang menjadi pemetaan dalam program komunitas adat terpencil di wilayah Marajai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Indikator kedua “Jumlah warga Komunitas Adat Terpecil (KAT) yang mendapatkan pembinaan” realisasi 54 Kepala Keluarga dari target yang ditetapkan 70 Kepala Keluarga dengan persentase capaian 77%. Kegiatan pembinaan bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpecil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan mereka agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

Indikator ketiga “Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang terampil” realisasi kinerja 8 TKSK dari target yang ditetapkan 8 TKSK sehingga persentase capaian kinerja 100%. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau yang disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan. Kabupaten Balangan memiliki 8 Kecamatan, sehingga jumlah TKSK yang ada di Kabupaten Balangan berjumlah 8 (delapan) orang dengan tujuan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan, melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial



lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya ditingkat kecamatan.

Indikator keempat “Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) yang terampil” realisasi 40 Orang dari target yang ditetapkan 40 Orang sehingga persentase capaian kinerja 100%. Menurut Peraturan Menteri Sosial 10 Tahun 2019 Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan dari adanya PSM adalah untuk terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan terlaksananya pelayanan sosial masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial.

Indikator kelima “Jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tervalidasi realisasi 6859 KK dari target yang ditetapkan 9336 KK sehingga persentase capaian kinerja 73%. Bantuan Pangan Non Tunai disingkat BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau kartu sembako yang diberikan pemerintah pada masyarakat yang kurang mampu.

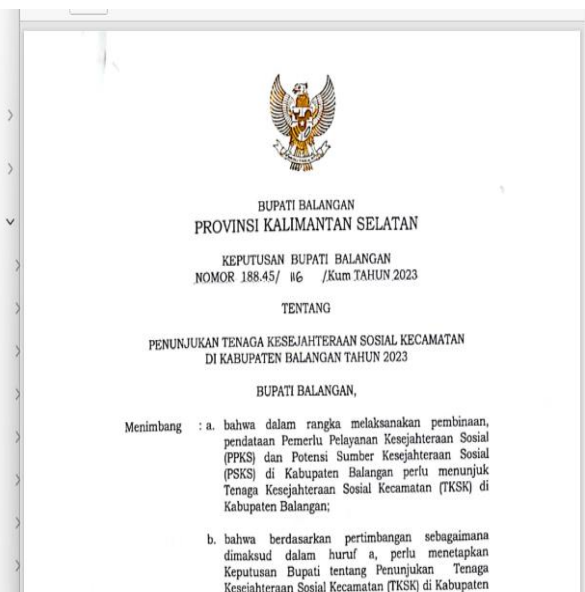
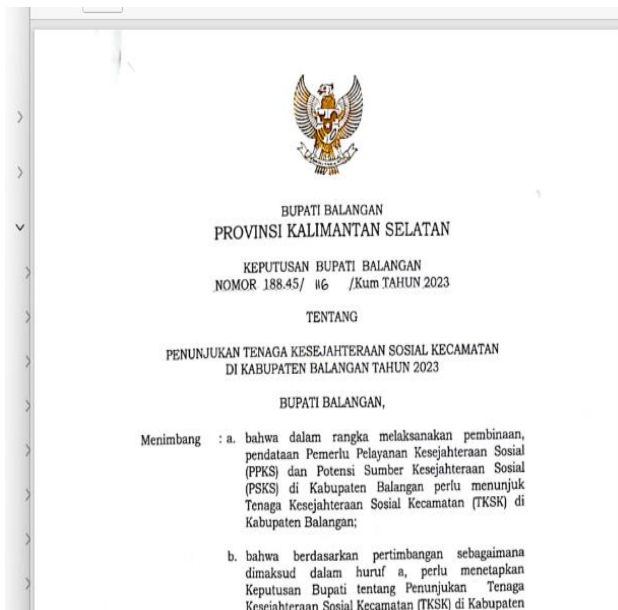
Indikator keenam “Jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan program keluarga (PKH) yang tervalidasi” realisasi kinerja 3.687 KK dengan target yang ditetapkan 3.757 KK sehingga persentase capaian kinerja 98%. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan 6 (enam) indikator diatas di Kabupaten Balangan Tahun 2022:

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



Lokasi dan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Marajai





*Rapat bersama Tenaga Kesejahteraan Masyarakat dan Pekerja Sosial Masyarakat*

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Kegiatan: Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan sub kegiatan: Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT, dan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
2. Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

### **B. Capaian Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini terlihat sebagai suatu kenyataan yang sederhana tetapi sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.

Permasalahan gender sudah sejak lama menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada kedua belah pihak menyebabkan pandangan yang mendiskreditkan salah satu kaum yang umumnya adalah kaum perempuan.

Berdasarkan adanya permasalahan terkait gender dan pentingnya aspek gender dalam pembangunan sehingga mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut INPRES Nomor 9 Tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Selain itu juga yang perlu juga menjadi perhatian adalah terkait kekerasan yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini, terutama terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia terutama bagi Pemerintah Kabupaten Balangan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara.

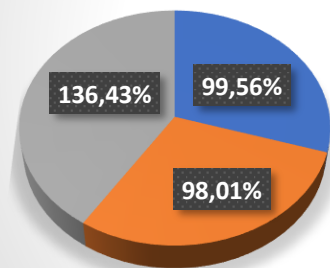
IPG ( Indeks Pembangunan Gender) adalah indeks perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM Perempuan yang dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Sedangkan IDG adalah indeks pemberdayaan gender yang mengukur partisipasi perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Kedua indeks tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan gender dan pemberdayaan gender sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan gender.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 menunjukkan sebagaimana tersebut secara ringkas pada table berikut terdapat 2 (dua) Sasaran. Sasaran yang pertama Meningkatnya kesetaraan gender dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja yaitu Indeks

Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD. Selanjutnya Sasaran yang kedua Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 2 (dua) indikator yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dan Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak). Berikut ini merupakan target capaian dari sasaran meningkatnya kesetaraan gender.

Sasaran 1: Meningkatnya Kesetaraan Gender							
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)	Kategori
1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	99,47%	92,74	92,33	99,56	99,43	Sangat Tinggi
2	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	99,11	72	70,57	98,01	92,86	Sangat Tinggi
3	Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD	100	21%	28,65%	136,43%	135,14%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata</b>					<b>99,19%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	

**CAPAIAN KINERJA KEPALA DINAS URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER**



- IPG (Indeks Pembangunan Gender)
- IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
- Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja Langsung APBD

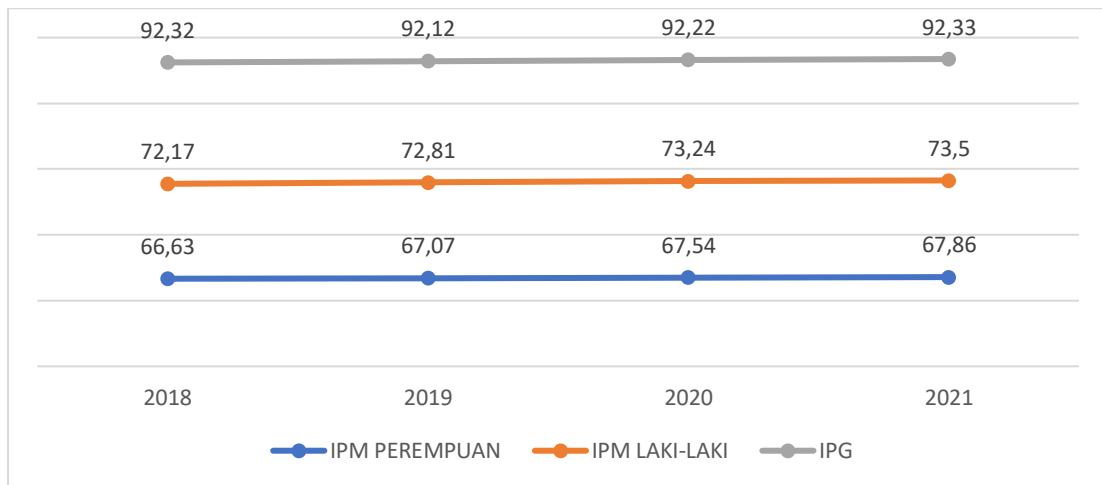


Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada dimensi digunakan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

### Perkembangan IPM Perempuan, IPM Laki-Laki dan IPG 2018-2021 Kabupaten Balangan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tren dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender terus mengalami peningkatan hingga mencapai 92,33. Meskipun demikian IPM perempuan masih berada dibawah IPM laki-laki

#### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan sasaran “Meningkatnya kesetaraan gender” Indikator Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Eselon II) yang pertama “Indeks Pembangunan Gender”. Realisasi dari indeks pembangunan gender Kabupaten Balangan pada tahun 2022, menggunakan data Indeks yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait IPG tahun 2021. Untuk Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 yaitu 92,33 dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 92,74 sehingga persentase capaian kinerja 99,56%.

#### 2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Berdasarkan sasaran “Meningkatnya kesetaraan gender” Indikator Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Eselon II) yang pertama “Indeks Pembangunan Gender” pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 realisasi Indeks Pembangunan Gender adalah 92,22 sedangkan tahun 2022 adalah 92,33, jika dilihat dari

perbandingannya telah terjadi peningkatan dari Indeks Pembangunan Gender dari tahun 2021-2022 sebanyak 0,11.

### 3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Memperhatikan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terkait realisasi indeks pemberdayaan gender tahun 2022 yaitu 92,33 dari target yang ditetapkan 92,74 sehingga persentase capaian kinerja 99,56%. Untuk Tahun 2021 persentase capaian yang diperoleh 99,47% sehingga dapat dilihat dari segi capaian dari tahun 2021 terhadap tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,09. Selain itu jika dibandingkan dengan pencapaian IPG Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar 103,91%. Realisasi IPG Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 88,86 sedangkan realisasi IPG Kabupaten Balangan sebesar 92,33 yang berarti kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Balangan masih terdapat kesenjangan, sehingga diperlukan kiat-kiat ataupun tindakan yang nyata untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

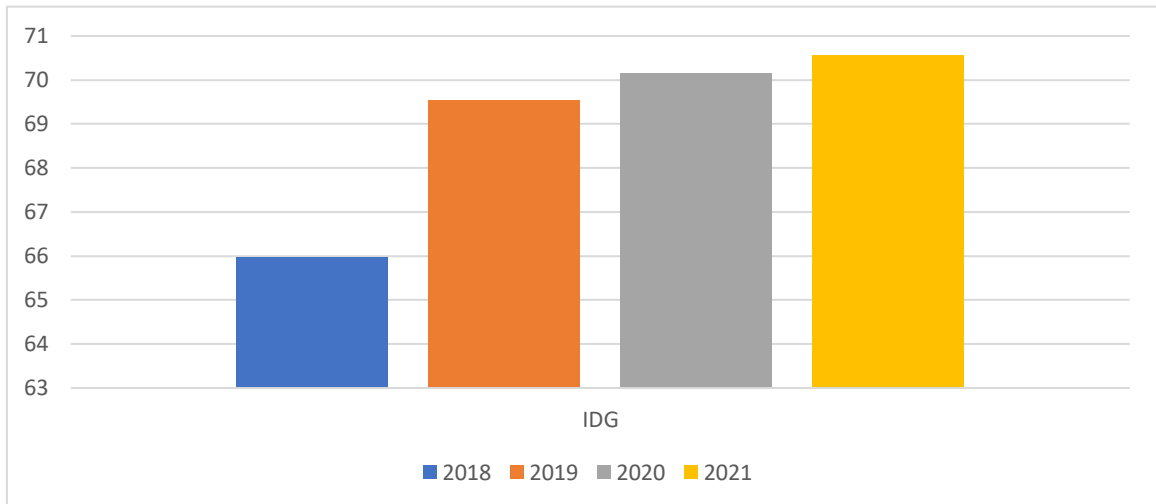
Kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya legitimasi konstruksi budaya di masyarakat yang cenderung patriaki, dimana ada pandangan bahwa laki-laki lebih dalam segala hal dibandingkan perempuan. Kesenjangan juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan interpretasi ajaran agama dan adanya kebijakan politik, yang merugikan gender tertentu.

Selanjutnya Indikator yang kedua “ Indeks Pemberdayaan Gender”. IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan



keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

### Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021



Berdasarkan grafik diatas, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2018 s/d 2021 untuk Indeks Pemberdayaan Gender mengalami peningkatan. Capaian IDG pada tahun 2021 meningkat 0,43 dibandingkan tahun 2020 dari 70,14 menjadi 70,57. Dengan adanya peningkatan dari indeks pemberdayaan gender telah menggambarkan bahwa adanya kepercayaan yang diberikan kepada perempuan terutama dalam perempuan sebagai tenaga professional dan perempuan dengan memiliki pendapatan.

#### 1) Perbandingan Realisasi dan Target

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Balangan pada Tahun 2022 menggunakan data IDG yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi dari indeks pemberdayaan gender sebesar 70,57 dari target yang ditetapkan sebesar 72 sehingga persentase capaian kinerja 98,01%.

#### 2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Balangan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Pada tahun 2021 realisasi IDG sebesar 70,14 dari target 70,77 sehingga persentase capaian tahun

2021 99,11%. Sehingga dapat dilihat perbandingan dari realisasi dari tahun 2021 terhadap 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,43.

### **3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Dapat dijelaskan bahwa terkait indikator “Indeks Pemberdayaan Masyarakat” memiliki target pada tahun 2022 adalah sebesar 72 dan realisasi tahun 2022 dengan memakai data indeks tahun 2021 sebesar 70,57 sehingga diperoleh capaian untuk tahun 2022 adalah sebesar 98,01%. Pada tahun 2021 persentase capaian 99,11% sehingga didapat informasi bahwa persentase capaian antara tahun 2021-2022 terdapat penurunan sebesar 1,10% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang disajikan pada paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa dari segi capaian terjadi penurunan dari tahun 2021 terhadap 2022, namun jika kita melihat dari segi realisasi bahwa dalam indikator kinerja indeks pemberdayaan gender mengalami kenaikan. Selain itu juga jika melihat dari nilai indeks yang telah disajikan bahwa dari tahun 2020 terhadap 2021 juga mengalami kenaikan, sehingga dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan politik semakin menuju kearah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatkannya kesetaraan peran gender. Berdasarkan data-data yang telah disajikan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pemenuhan terhadap capaian kinerja terkait indikator tersebut peningkatannya tidak dapat yang bersifat signifikan, dimana masih perlu usaha yang cukup ekstra dan bertahap.

Beberapa Program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender perlu terus didorong guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya dapat diselenggarakan secara lebih setara, contohnya berdasarkan hasil pemilu 2019-2024, persentase anggota parlemen perempuan di Provinsi Kalimantan selatan hanya 16,36%, bahkan untuk kabupaten Balangan hanya sebesar 16% keterwakilan perempuan di parlemen.

Selanjutnya Indikator yang ketiga “Persentase ARG (Anggatan Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD”. Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya

pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

### **1) Perbandingan Realisasi dan Target**

Indikator kinerja "Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD" pada tahun 2022 memiliki target kinerja 21% dan realisasi kinerja 28,65% sehingga persentase capaian kinerja 136.43%.

### **2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

Indikator kinerja "Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD" pada tahun 2022 memiliki target kinerja 21% dan realisasi kinerja 28,65% sehingga persentase capaian kinerja 136.43%. Untuk tahun 2021 target kinerja 18% dan realisasi kinerja 18,01% sehingga persentase capaian kinerja 100%. Sehingga jika melihat perbandingan antara realisasi pada tahun 2021 terhadap 2022 mengalami kenaikan sebanyak 10,64% dan untuk capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebanyak 36,43%.

### **3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Indikator kinerja "Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Langsung APBD" pada tahun 2022 memiliki target kinerja 21% dan realisasi kinerja 28,65% sehingga persentase capaian kinerja 136.43%. Untuk tahun 2021 target kinerja 18% dan realisasi kinerja 18,01% sehingga persentase capaian kinerja 100%. Sehingga jika melihat perbandingan antara realisasi pada tahun 2021 terhadap 2022 mengalami kenaikan sebanyak 10,64% dan untuk capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebanyak 36,43%. Berdasarkan data yang disajikan didapat informasi bahwa terkait indikator persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD mengalami kenaikan terkait realisasi dan capaian.

#### **a. Upaya yang telah dilakukan**

Dalam mendukung tercapainya dari sasaran meningkatkan kesetaraan gender dengan 3 (tiga) indikator Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender)

pada Belanja Langsung APBD” terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan.

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengedepankan dan memperkuat peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dalam meningkatkan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender.
2. Adanya kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dengan Instansi/SKPD terkait.
3. Adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.

Selain itu upaya-upaya yang dilakukan agar pembangunan berkelanjutan terhadap para perempuan-perempuan, beberapa kegiatan telah dilakukan, yaitu:

- a. Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan dengan para perangkat daerah agar dalam perencanaan sebuah kegiatan perlu memperhatikan anggaran yang bersifat responsive gender.
- b. Melaksanakan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.
- c. Melaksanakan pelatihan terhadap organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan

**b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

- 1) Masih adanya budaya patriaki yang dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga menghambat/menciptakan kesenjangan gender di tengah masyarakat.
- 2) Belum optimalnya kerjasama yang dibangun oleh beberapa organisasi secara sektoral dalam lingkup pemerintah daerah serta organisasi dari lintas sektor lain.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

1. Meningkatkan kerjasama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dengan instansi yang terkait.
2. Menggiatkan sosialisasi ketengan masyarakat guna membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat.

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja dari tercapainya sasaran “Meningkatnya Kesetaraan Gender”**

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai sasaran strategis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibantu oleh1 (satu) Orang Kepala Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

<b>Sasaran 2: Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak</b>						
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(per 100.000 Penduduk Perempuan)	75,18%	14	17,4	75,71%	127,94%
2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak(per-10.000 Anak)	41,50%	1,9	2,7	57,89%	92,86
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>99,19%</b>	

Berdasarkan deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan Desember 1993 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan akan kemajuan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sebagai "tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat penderitaan fisik, seksual, atau psikologis perempuan termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hampir semua insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan hanya insiden yang hanya berhenti disitu, melainkan juga menjadi faktor yang memicu terjadinya berbagai jenis kekerasan lainnya seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan pemiskinan kaum perempuan. Berdasarkan penelitian, sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada akhirnya terperangkap dalam berbagai bentuk perdagangan manusia, seperti dipaksa menjadi pelacur, babu, buruh kasar dan lain sebagainya.

### **1) Perbandingan Realisasi dengan Target**

Berdasarkan dari tabel di atas, terkait Indikator Kinerja "Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (100.000 penduduk perempuan) dengan target kinerja 14 dan realisasi 17,4 sehingga persentase capaian 75,71%. Dimana belum dapat memenuhi target yang ditetapkan karena kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan masih terjadi dan masyarakat yang sudah peduli terhadap kekerasan perempuan yang ada dilingkungan sekitarnya dan berusaha memberikan bantuan dengan melaporkan tindakan kekerasan tersebut. Untuk

setiap tahunnya rasio kekerasan terhadap perempuan harusnya terjadi penurunan.

## **2) Perbandingan Realisasi dengan Target Sebelumnya**

Berdasarkan dari tabel di atas, terkait Indikator Kinerja “Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (100.000 penduduk perempuan) dengan target kinerja 14 dan realisasi 17,4 sehingga persentase capaian 75,71%. Untuk tahun 2021 sendiri target yang ditetapkan 14,1 dengan realisasi 17,6 dengan persentase capaian 75,18%. Mengacu pada data pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat bahwa dari segi realisasi mengalami penurunan 0,20.

## **3) Analisis peningkatan/penurunan kinerja**

Berdasarkan dari data-data yang telah disajikan pada penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa angka kekerasan perempuan harusnya setiap tahun mengalami penurunan, sebagai hasil dari kinerja yang ingin dicapai. Dilihat bahwa rasio kekerasan yang telah didapatkan perbandingan antara capaian tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,53. Hal tersebut disebabkan karena kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi namun saat ini munculnya kesadaran dari masyarakat yang peduli untuk dapat melaporkan kasus kekerasan yang ada disekitar mereka menandakan pencapaian target kinerja yang semakin baik dan menunjukkan keberhasilan sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk dapat dengan segera melaporkan jika terjadi kasus kekerasan yang ada dilingkungan mereka. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 dan 2022 jumlahnya sama sebanyak 8 perempuan kasus kekerasan dan tidak mengalami peningkatan dari segi jumlah.

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak merupakan setiap perbuatan terhadap anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan yang dialami anak dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif , sosial, emosional dan fisik anak.

**1) Perbandingan Realisasi dengan Target**

Berdasarkan indikator yang kedua “ Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)”. Target rasio yang ditetapkan 1,9 dengan realisasi 2,7 sehingga persentase capaian 57,89%.

**2) Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya**

Berdasarkan indikator yang kedua “Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)”. Target rasio yang ditetapkan 1,9 dengan realisasi 2,7 sehingga persentase capaian 57,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 3,17 dan realisasi 2022 adalah 2,7 telah terjadi penurunan dari segi realisasi sebesar 0,47. Dari persentase capaian sendiri tahun 2022 sebesar 57,89 dan tahun 2021 41,50 sehingga terjadi kenaikan sebesar 16,39%.

**3) Analisis peningkatan/penurunan kinerja**

Berdasarkan indikator yang kedua “Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)”. Target rasio yang ditetapkan 1,9 dengan realisasi 2,7 sehingga persentase capaian 57,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 3,17 dan realisasi 2022 adalah 2,7 telah terjadi penurunan dari segi realisasi sebesar 0,47. Dari persentase capaian sendiri tahun 2022 sebesar 57,89 dan tahun 2021 41,50 sehingga terjadi kenaikan sebesar 16,39%.

Hal itu terjadi karena jika diperbandingkan kasus kekerasan anak yang diberikan pendampingan pada tahun 2021 sebanyak 24 anak sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan anak dan diberikan pendampingan sebanyak 11 anak. Sehingga jika melihat dari kasus kekerasan anak dari tahun 2022 terhadap kasus anak yang tertangani telah mengalami penurunan sebanyak 13 orang.

Setiap tahun kekerasan yang dialami perempuan dan anak cenderung marak dan sangat mencemaskan, padahal pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang keras untuk mengatasinya.

Hampir semua insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan hanya insiden yang hanya berhenti disitu, melainkan juga menjadi faktor yang memicu terjadinya berbagai jenis kekerasan lainnya seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan pemiskinan kaum perempuan. Berdasarkan penelitian, sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada akhirnya terperangkap dalam



berbagai bentuk perdagangan manusia, seperti dipaksa menjadi pelacur, babu, buruh kasar dan lain sebagainya.

Faktor utama penyebab merebaknya serta tak terkendalinya kekerasan yang dialami perempuan dan anak, dikarenakan selama ini terkesan pemerintah maupun masyarakat sipil melihat dan menangani ini, sebagai dua masalah yang terpisah, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, padahal ini merupakan permasalahan yang integral dan saling mempengaruhi. Dimana dapat dipastikan, jika terjadi kekerasan menimpa perempuan, kemungkinan besar di dalamnya juga terjadi kekerasan terhadap anak.

**a. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yang mempengaruhi keberhasilan dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk menjadikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai organisasi terdepan yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Adanya kerjasama lintas sektor, sehingga jika terjadi permasalahan dapat segera tertangani dengan baik
3. Adanya kesadaran pada masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak.
4. Penurunan jumlah kasus anak daripada tahun sebelumnya karena banyaknya usaha preventif atau pencegahan yang pihak intervensi melalui kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mulai ada kesadaran untuk melapor jika terjadi tindakan kekerasan terhadap anak.
5. Penyelesaian kasus-kasu kekerasan yang dapat diselesaikan di tingkat desa melalui kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang telah dibentuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**b. Permasalahan/hambatan**

1. Adanya rasa enggan/malu melaporkan atas kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwenang , karena beranggapan itu adalah aib.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

1. Melaksanakan peningkatan kerjasama lintas sektor,
2. Perlunya menyiapkan tenaga yang berkompeten dalam menangani korban tindak kekerasan.

**e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja dari tercapainya sasaran “Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak”**

Percapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Program Perlindungan Perempuan
2. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program pemenuhan Hak Anak (PHA)

**3.2.2.1 Eselon III (Kabid Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)**

**Pencapaian Kinerja**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bidang yang berupaya dalam melakukan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam perjanjian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Kepala Bidang Peremberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan khusus Anak Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintah Dalam pelaksanaan PUG	Jumlah Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 lembaga	30 lembaga	100%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	17,26%	33,20%	192%
3	Meningkatnya kualitas sistem data gender dan anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%
4	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan khusus anak serta meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%
		Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>118,4%</b>



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan sasaran “Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintah Dakam pelaksanaan PUG” dengan Indikator “Jumlah Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG” pada tahun ini realisasi 30 SKPD dari target yang ditetapkan 30 SKPD sehingga persentase capaian kinerja 100%.

Selanjutnya sasaran yang kedua “Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga” dengan Indikator “Persentase Perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun” realisasi 33,20% dari target yang ditetapkan 17,26% sehingga persentase capaian 192%.

Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas Sistem Data Gender dan Anak” dengan indikator “ Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak” realiasi 100% dari target 100% sehingga persentase capaian 100%.

Sasaran keempat “Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak serta meningkatnya pemenuhan hak anak” dengan indikator “Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif” dengan target 100% realisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Indikator “Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif” dengan realisasi 100% dengan target yang 100% sehingga persentase capaian 100%.

Pada indikator kinerja pertama “Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG” tahun 2022 teralisasi 100% dengan capaian kinerja Sangat Tinggi, hal tersebut didukung karena target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan telah dilaksanakannya kegiatan pelatihan kepada 30 SKPD yang ada di Kabupaten Balangan terkait Pengarusutamaan Gender.

Indikator yang kedua “Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG” tahun 2022 realisasi telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 192% dan kategori sangat tinggi.

Indikator yang ketiga “Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak” tahun 2022 realisasi 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori sangat tinggi.

Indikator yang ke empat “Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif” dengan realiasi 100% dan telah terpenuhinya target yang ditetapkan dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Dilihat dari indikatornya merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dengan diberikan pendampingan selama penanganan kasus.

Indikator yang kelima “Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif” dengan realiasi 100% dan telah terpenuhinya target yang ditetapkan dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Dilihat dari indikatornya merupakan bentuk

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

pelayanan yang diberikan kepada penanganan kasus anak dengan diberikan pendampingan selama penanganan kasus.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kelima indikator diatas, sebagai berikut:



*Kegiatan Rapat POKJA Pengarusutamaan Gender*



*Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini*



*Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Terhadap Anak*





*Kegiatan Sosialisasi Advokasi Kekerasan*



*Kegiatan Sosialisasi Hak-Hak Anak*

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kelima indikator diatas, tentu dalam pelaksanaan terdapat hambatan, terutama untuk dapat mengumpulkan peserta sosialisasi terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Desa, belum adanya kendaraan operasional mobil pelayanan khusus mobil perlindungan perempuan dan anak, dan pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan terkait kesetaraan gender dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Mengacu dengan kendala diatas rencana tindak lanjut tetap melaksanakan koordinasi dan membangun kerjasama agar adanya keaktifan yang terjadi pada saat dilaksanakannya sosialisasi.



Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan
  - Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - Kegiatan:Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - Kegiatan:Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Hak Anak
  - Kegiatan:Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
  - Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dalam mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Kepala Bidang, Jaminan Sosial dan Bencana Alam dibantu oleh 3 (Tiga) JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2022, berikut hasil capaian kinerja;

#### **A. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

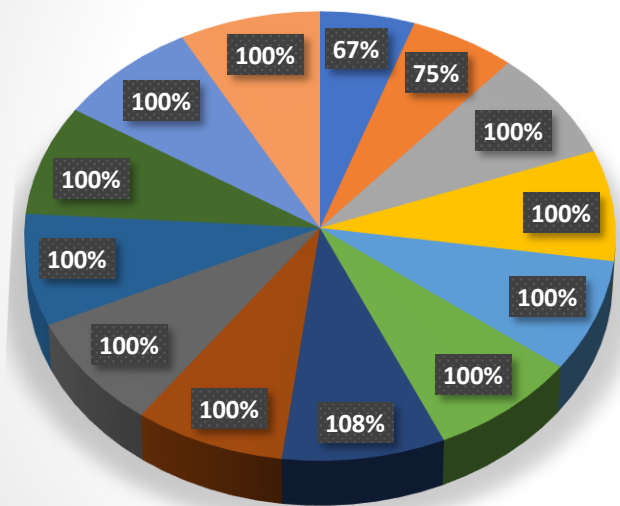
Perlindungan Anak dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pembinaan Gugus Tugas KLA di Kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	270 Orang	180 Orang	67%
		Jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	64 Orang	48 Orang	75%
2	Terlaksananya pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang ramah anak	21 Buah	21 Buah	100%
		Jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak	1 Buah	1 Buah	100%
		Jumlah masjid yang memenuhi kriteria ramah anak	5 Buah	5 Buah	100%
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	80 Orang	80 Orang	100%
3	Meningkatnya kualitas kader posyandu, Lembaga dan Masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Jumlah kader posyandu, Lembaga dan masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	130 Orang	140 Orang	108%
4	Terbentuknya forum anak desa (FAD)	Jumlah forum anak desa yang terbentuk	5 Kelompok	5 Kelompok	100%

5	Terlaksananya pendataan profil anak	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%
6	Meningkatnya kualitas jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	35 Orang	35 Orang	100%
		Jumlah ruang laktasi	0 Buah	0 Buah	0
		Jumlah puskesmas yang terstandar ramah anak	12 buah	12 buah	100%
7	Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	200 Orang	200 Orang	100%
8	Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase korban anak yang terlayani	100%	100%	100%
9	Terbentuknya PATBM	Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	138 Orang	138 Orang	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>96,42%</b>

**CAPAIAN KINERJA JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT  
 AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PEMENUHAN HAK ANAK  
 DAN PERLINDUNGAN KHUSUS)**



- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa
- Jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak
- Jumlah sekolah yang ramah anak
- Jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak
- Jumlah masjid yang memenuhi kriteria ramah anak
- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak
- Jumlah kader posyandu, Lembaga dan masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak
- Jumlah forum anak desa yang terbentuk
- Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak
- Jumlah ruang laktasi
- Jumlah puskesmas yang terstandar ramah anak
- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
- Persentase korban anak yang terlayani
- Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian dari masing-masing indikator ada yang <100 dan >100%. Sasaran pertama “Terlaksananya Pembinaan Gugus Tugas KLA di Kabupaten” dengan Indikator “Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa “ dengan realisasi 180 orang dari target 270 orang sehingga capaian 67% dengan kategori capaian sedang. Dan Indikator kedua “jumlah anggota GT KLA yang memenuhi tentang pemenuhan hak anak” realisasi 48 orang dari 64 orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian 75%. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhandari target indikator diatas dengan melakukan sosialisasi ke Desa Sumber Rejeki.

Sasaran kedua “Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga” dengan indikator “Jumlah sekolah yang ramah anak” dengan realisasi 21 Buah dengan target yang ditetapkan 21 Buah sehingga persentase capaian 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas kader posyandu, Lembaga dan masyarakat dalam pemenuhan anak” dengan realisasi 140 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 130 orang sehingga capaian 108% dengan kategori capaian sangat tinggi. Kegiatan tersebut berupa pelatihan bagi kader posyandu yang ada di balangan dalam pemenuhan haka anak di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi.

Sasaran keempat Terbentuknya Forum Anak Daerah dengan Inidkator “Jumlah forum anak desa yang terbentuk” dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok sehingga persentase capaian 100% dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran kelima Terlaksananya pendataan profil anak dengan Indikator “Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak” realisasi 2 Kecamatan dari target yang ditetapkan 2 sehingga persentase capaian 100% dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran keenam “Meningkatnya kualitas jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak” dengan indikator “ Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak” realisasi 35 Orang dari target 35 orang sehingga persentase capaian 100% sehingga kategori capaian sangat tinggi. Selanjutnya indikator kedua : jumlah puskesmas yang terstandar ramah anak” target 12 buah dengan realisasi 12 buah sehingga persentase capaian 100%.

Sasaran ke tujuh “Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak” dengan indikator “Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak” dengan target 200 orang dan terealisasi 200 orang sehingga persentase capaian kinerja 100%. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 1 Paringin, SMK 1 Batumandi, dan SMP 5 Paringin.

Sasaran ke delapan “Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak” dengan indikator “Persentase korban anak yang terlayani” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian persentase 100%. Pada tahun 2022 jumlah anak korban kekerasan berjumlah 11 orang dan sudah mendapatkan pelayanan dan pendampingan dari pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sasaran ke Sembilan “Terbentuknya PATBM” dengan Indikator “Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa” dengan target 138 orang dengan realisasi 138 orang sehingga persentase 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Awayan, Desa Buntu Karau, Desa Banua Hanyar, Desa Lasung Batu, Desa Halubau Utara.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan 15 (lima belas) indikator diatas, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



*Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak*



*Sosialisasi Pola Asuh Pengasuhan Anak dan Remaja*



*Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Daerah*



PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



*Pelatihan Kepada Tenaga Kesehatan tentang Konvensi Hak Anak*



*Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik di Sekolah dan Pondok Pesantren serta Pengurus Masjid*



*Rapat Tim Gugus tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022*



PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak termasuk bahaya bullying dan pornografi



Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Mengacu dari beberapa data dukung diatas, dapat dilihat bahwa adanya upaya yang dilakukan dalam merealisasikan target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, selain dari itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari keberhasilan adalah:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
2. Adanya sinergitas dan kerjasama yang baik dari para narasumber, serta peserta dalam mengikuti kegiatan baik sosialisasi dan pelatihan yang telah diberikan.

Hambatan yang dialami dalam pemenuhan dalam proses merealisasikan kegiatan yaitu masih terbatasnya anggaran yang berpihak dalam pemenuhan 15 (lima belas) indikator serta belum aktifnya partisipasi masyarakat baik dewasa, remaja dan anak.

Strategi pemecahan masalah yang dilakukan tersebut menjalin hubungan dengan memohon pertolongan dari beberapa pihak bagi pihak sekolah dan pemerintah desa dalam usaha mengakomodir agar masyarakat, remaja, dan anak-anak dapat berhadir

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota,
2. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

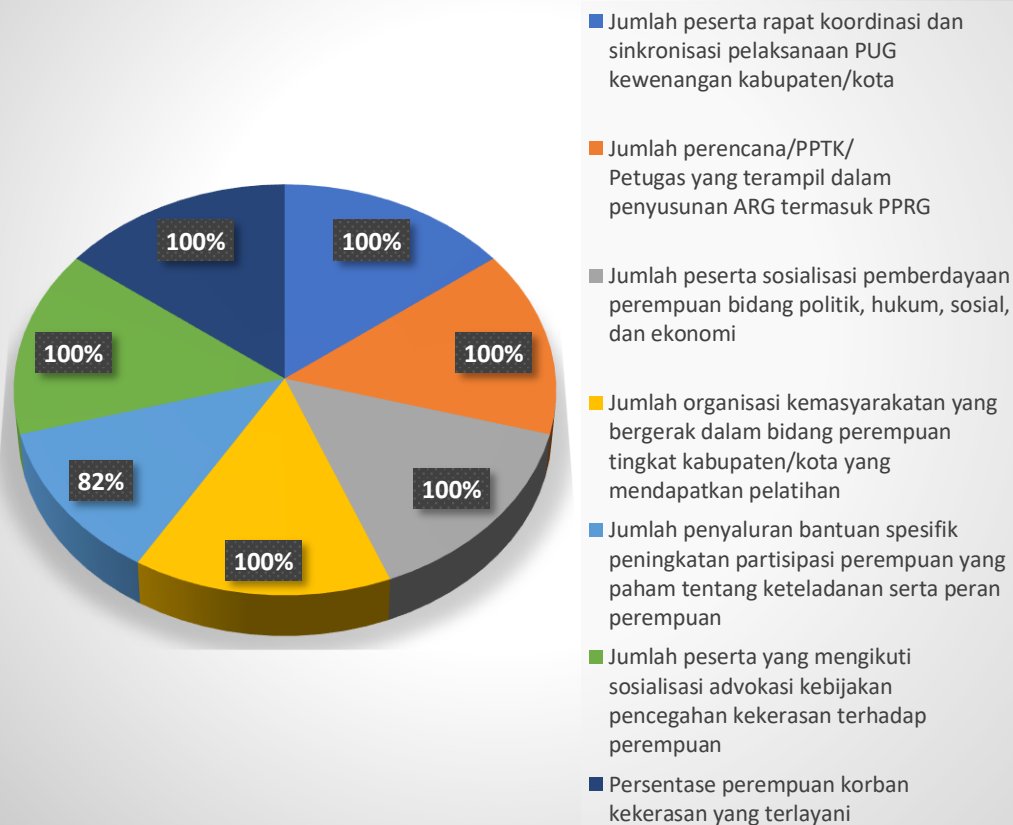
3. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya pendampingan SKPD dalam melaksanakan PPRG di Kabupaten Balangan	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	200 Orang	200 Orang	100%
		Jumlah perencana/PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	50 Orang	50 Orang	100%
2	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	138 Orang	138 Orang	100%

3	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
		Jumlah penyaluran bantuan spesifik peningkatan partisipasi perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	170 Paket	170 Paket	100%
		Jumlah penyaluran bantuan bakti sosial peningkatan partisipasi perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	17 Paket	14 Paket	82%
4	Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	205 Orang	205 Orang	100%
5	Terlaksananya penanganan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>97,75%</b>

**PERJANJIAN KINERJA JF PENGGERAK SWADAYA  
MASYARAKAT AHLI MUDA  
( SUB KOORDINATOR PENINGKATAKAN KUALITAS  
KELUARGA & PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER)**



Sasaran pertama “Terlaksananya pendampingan SKPD dalam melaksanakan PPRG di Kabupaten Balangan” dengan Indikator pertama “Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota” dengan target yang ditetapkan 200 Orang dan Terealisasi 200 Orang sehingga persentase capaian 100%. Selanjutnya Indikator ke dua” Jumlah perencana/PPTK/Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG dengan target yang ditetapkan 50 Orang dan terealisasi 50 Orang sehingga persentase capaian 100%.Kegiatan yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target yaitu kegiatan rapat dan sinkronisasi terkait kegiatan-kegiatan di SKPD dalam menyusun anggaran kegiatan untuk dapat memperhatikan anggaran responsive gender dan pemenuhan dari indikator kedua



dilaksanakan kegiatan pelatihan terhadap kassubag perencanaan dan keuangan dari setiap SKPD terkait menyusun perencanaan yang perlu memperhatikan anggaran responsive gender. Berikut upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target:



*Rapat Tim Pokja dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG)*

Sasaran kedua “ Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi” dengan Indikator “Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi” dengan target yang telah dibuat 138 Orang dan Realisasi 138 Orang dengan Persentase Capaian 100%.

Sasaran ketiga “Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan” dengan Indikator 1 (satu) “Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan” dengan target 3 Organisasi dan realisasi 3 organisasi sehingga persentase capaian 100%.Selanjutnya Indikator 2 (dua) “Jumlah penyaluran bantuan spesifik peningkatan partisipasi perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan” dengan target yang ditetapkan 170 Paket dan realisasi 170 paket dengan persentase capaian 100%. Indikator 3 (tiga) “Jumlah penyaluran bantuan bakti sosial peningkatan partisipasi perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan” dengan target 17 paket dengan realisasi 14 paket sehingga persentase 82%.

Sasaran keempat “Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan” dengan Indikator “Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan” dengan target 205 Orang dan realisasi 205 orang dengan persentase capaian 100%. Upaya yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target dari indikator yaitu:



*Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan*

Sasaran kelima “Terlaksananya penanganan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO” dengan indikator “Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga persentase 100%. Pada tahun 2022 jumlah perempuan korban kekerasan sebanyak 8 orang dan seluruhnya terlayani dengan diberikannya pendampingan dari pihak dinas. Upaya yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target dari indikator yaitu:

Mengacu dari beberapa data dukung diatas, dapat dilihat bahwa adanya upaya yang dilakukan dalam merealisasikan target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, selain dari itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari keberhasilan adalah:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
2. Adanya sinergitas dan kerjasama yang baik dari para narasumber, serta peserta dalam mengikuti kegiatan baik sosialisasi dan pelatihan yang telah diberikan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

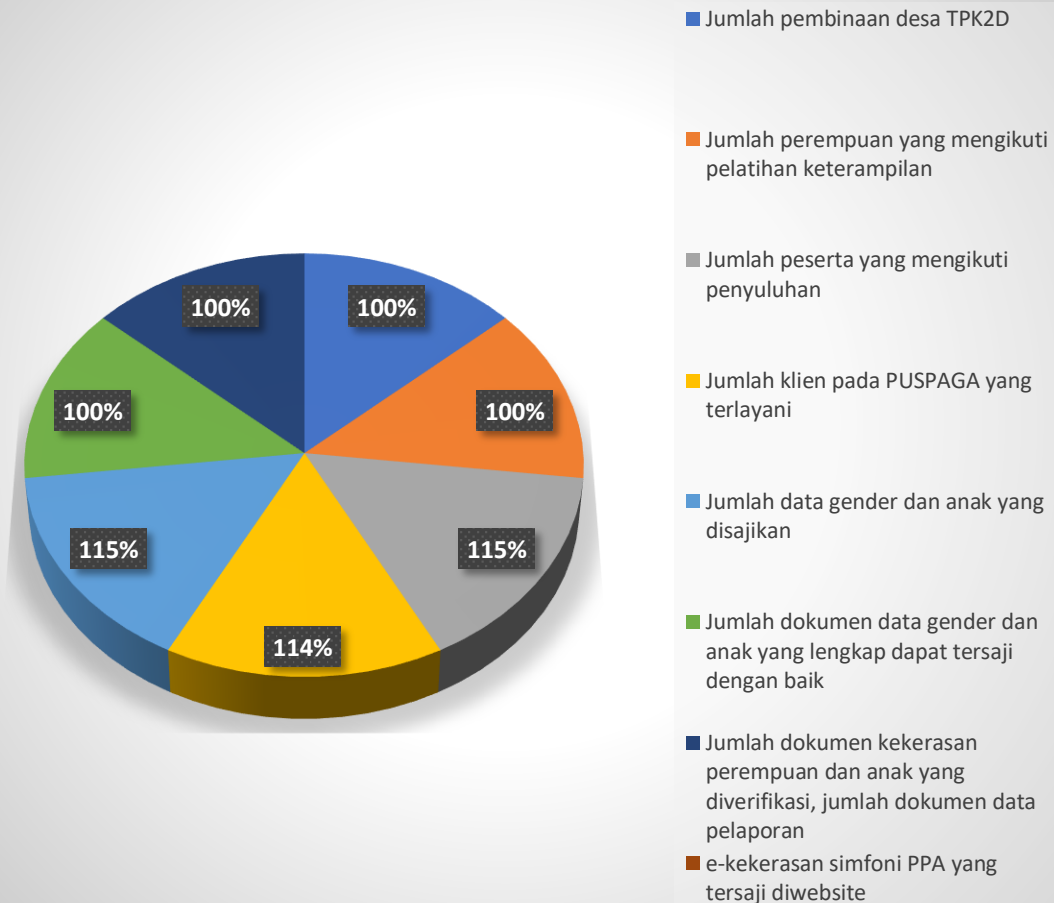
1. Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG,
2. Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya pelatihan bagi kader keluarga	Jumlah pembinaan desa TPK2D	10 Kali	10 Kali	100%
		Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	15 Orang	15 Orang	100%

2	Terlaksananya sosialisasi koordinasi dan advokasi penyuluhan pencegahan perkawinan anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	460 Orang	530 Orang	115%
3	Terlaksananya konseling pra nikah bagi calon penganten	Jumlah klien pada PUSPAGA yang terlayani	220 Orang	228 Orang	114%
4	Tersediannya data terpilah kabupaten dan data kekerasan perempuan dan anak melalui website simfoni	Jumlah data gender dan anak yang disajikan	122 tabel	140 tabel	115%
		Jumlah dokumen data gender dan anak yang lengkap dapat tersaji dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah dokumen kekerasan perempuan dan anak yang diverifikasi, jumlah dokumen data pelaporan e-kekerasan simfoni PPA yang tersaji diwebsite	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>106,28%</b>

**PERJANJIAN KINERJA JF PENGGERAK SWADAYA  
MASYARAKAT AHLI MUDA (SUB KUALITAS KELUARGA,  
PENGELOLAAN SISTEM DATA)**



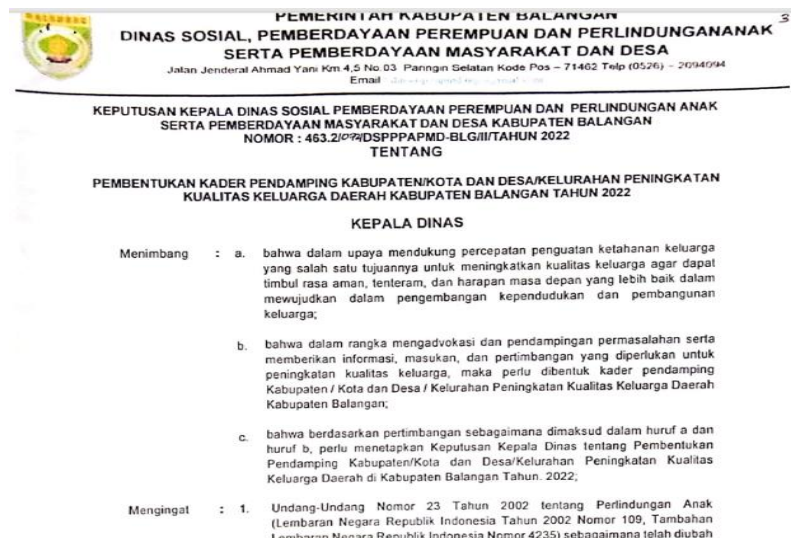
Sasaran I “Terlaksananya pelatihan bagi kader keluarga” dengan Indikator Kinerja” dengan Indikator “Jumlah pembinaan desa TPK2D” dengan target 10 kali dan realisasi 10 kali sehingga persentase capaian kinerja 100%. Upaya untuk mencapai target tersebut dengan melakukan kegiatan pembinaan bagi tim peningkatan kualitas keluarga daerah dengan lokus berada pada Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juai. Indikator Kedua “Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan” dengan target 15 orang dan realisasi 15 orang sehingga persentase capaian 100%.



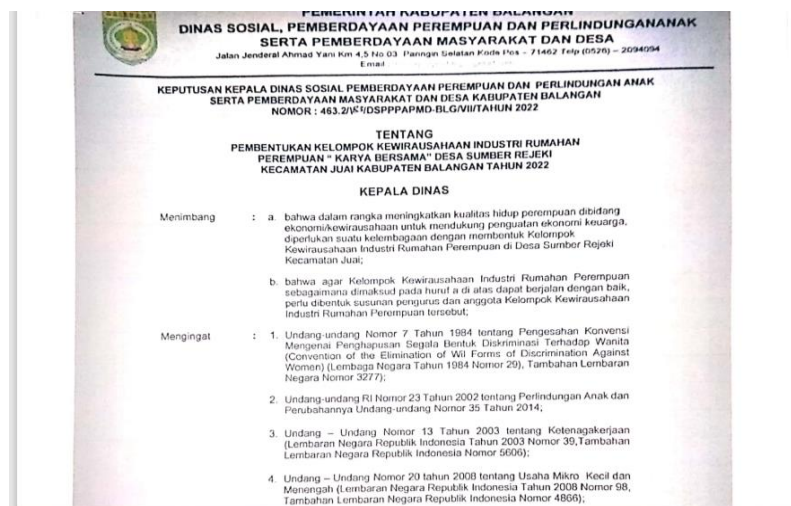
PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD



*Pembinaan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) di Sumber Rejeki*



*SK Kader TPK2D/Tenaga Pendamping Peningkatan Kualitas Keluarga*



*SK Pembentukan Kelompok Kewirausahaan Industri Rumahan Perempuan*



Sasaran kedua “Terlaksananya sosialisasi koordinasi dan advokasi penyuluhan pencegahan perkawinan anak” dengan indikator “Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan” dengan target 460 orang dan realiasi sebanyak 530 orang sehingga persentase capaian 115%. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu:



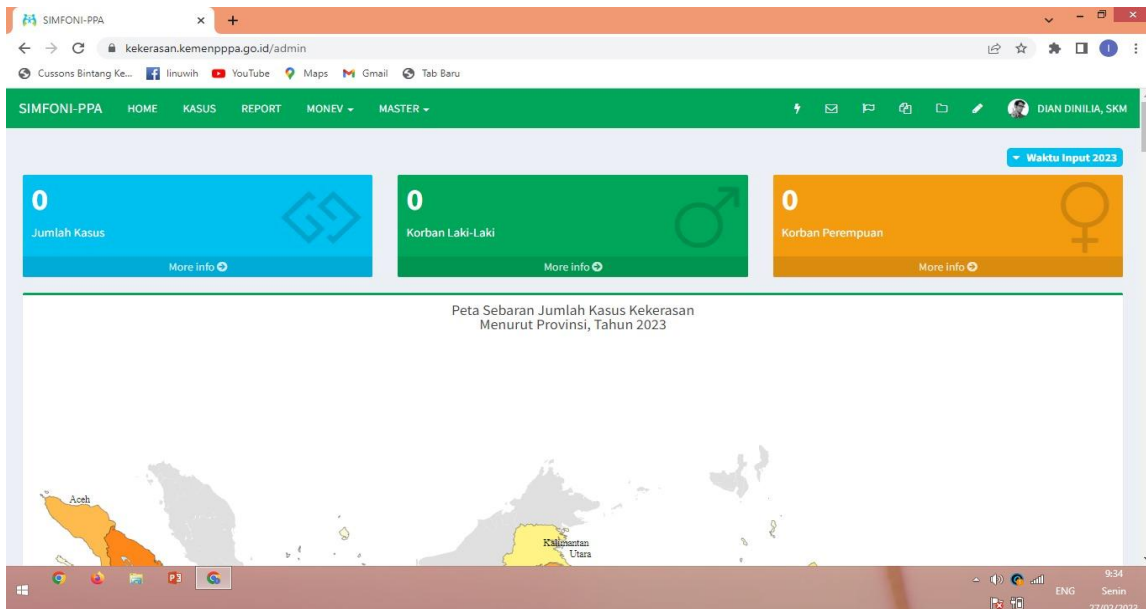
*Rapat Tim Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Anak*

**Sasaran ketiga** “Terlaksananya konseling pra nikah bagi calon penganten” dengan Indikator Capaian “Jumlah Klien PUSPAGA yang terlayani” dengan target 220 Orang dan realisasi 228 Orang sehingga persentase capaian 114%. Puspaga adalah bentuk layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program Pendidikan pengasuhan, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam upaya keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu:



*Ruang Pelayanan PUSPAGA*

Sasaran ketiga “ Tersedianya data terpilah kabupaten dan data kekerasan perempuan dan anak melalui website simfoni” dengan Indikator “ Jumlah data gender anak yang disajikan” dengan target 122 tabel dan realiasi 140 tabel dengan persentase capaian 115%. Indikator kedua “Jumlah dokumen data gender dan anak yang lengkap dapat tersaji dengan baik” dengan target 1 dokumen dan realiasi 1 dokumen sehingga persentase capaian 100%. Indikator ketiga “ Jumlah dokumen kekerasan perempuan dan anak yang diverifikasi jumlah dokumen data pelaporan e-kekerasan simfoni PPA yang tersaji diwebsite” dengan target 12 Dokumen dan realiasi 12 Dokumen sehingga persentase capaian kinerja 100%. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu:



*Aplikasi SIMFONI PPPA*

Mengacu dari beberapa data dukung diatas, dapat dilihat bahwa adanya upaya yang dilakukan dalam merealisasikan target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, selain dari itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari keberhasilan adalah:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

2. Adanya sinergitas dan kerjasama yang baik dari para narasumber, serta peserta dalam mengikuti kegiatan baik rapat tim pencegahan perkawinan dan penyuluhan yang telah diberikan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu:

1. Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota,
2. Kegiatan: Pemberdayaan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

### **C. Capaian Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

1. Indeks ketahanan sosial terdiri dari : Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);

2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan Kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan Kesehatan);
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke Pendidikan dasar dan menengah, akses Pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
4. Dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi akses ke listrik dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks ketahanan ekonomi terdiri dimensi ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdaganga, akses distribusi/logistic, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ekologi terdiri dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) indikator yang menjadi indikator kinerja utama pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

a. Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagaimana tersebut secara ringkas pada table berikut:

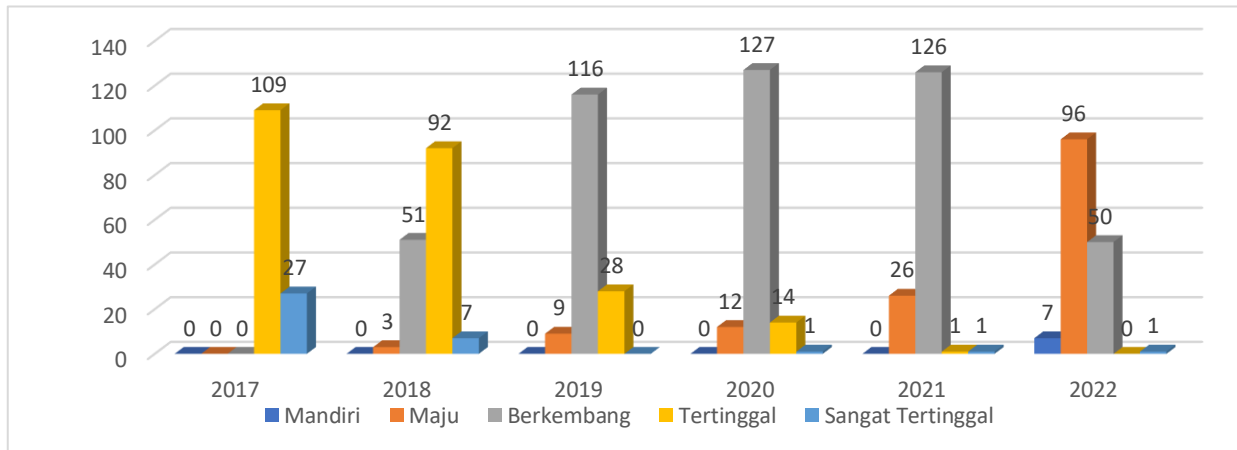
PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Sasaran : Meningkatkan Klasifikasi Desa							
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)	Kategori Capaian
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju	100%	23,38%	66,88%	286,06%	151,45%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>286,06%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	

Berdasarkan Indikator kinerja utama yaitu Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju. Pada tahun 2022 Kabupaten Balangan menargetkan 23,38% dengan realisasi 66,88%. Dalam mengukur realisasi dan capaian terhadap indikator berdasarkan indeks desa membangun (IDM) yang dimiliki oleh masing-masing desa di Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan terdiri dari 8 Kecamatan dan 154 Desa. Pada tahun 2022 capaian dari indikator persentase desa dengan klasifikasi maju adalah 286,06%, pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebanyak 186,06%.

Data Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Status Desa  
Menurut Indeks Desa Membangun (IDM)  
Tahun 2017-2022

Tahun	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	JUMLAH
2017	0	0	18	109	27	154
2018	0	3	51	92	7	154
2019	0	9	116	28	0	154
2020	0	12	127	14	1	154
2021	0	26	126	1	1	154
2022	7	96	50	0	1	154



Berdasarkan table dan grafik yang telah disajikan diatas bahwa pada tahun 2022 desa dengan klasifikasi maju berjumlah 96 Desa atau meningkat sebanyak 70 Desa dari keadaan tahun 2021. Selain itu juga terjadinya peningkatan dari status desa mandiri pada tahun 2022 terdapat 7 desa dari keadaan tahun 2021 yang belum ada desa yang status mandiri.

Selanjutnya, dapat diketahui pada saat ini jumlah desa dengan klasifikasi minimal maju di Kabupaten Balangan sebanyak 96 Desa dan untuk Desa Mandiri sebanyak 7 Desa. Dalam menghitung realisasi terhadap indikator tersebut adalah jumlah desa dengan klasifikasi maju ditambah dengan klasifikasi desa yang berstatus mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Balangan dikali dengan seratus. Pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun Kabupaten Balangan memiliki target 0,6595 dan untuk realisasi 0,7274 dengan capaian yang dimiliki adalah 110% dengan status IDM berada pada status Maju. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

Selanjutnya dengan adanya peningkatan dari status desa yang telah mengalami peningkatan menunjukkan data bahwa upaya pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal juga dapat dikatakan sangat berhasil pencapaiannya sampai tahun 2022, hal ini bisa dilihat dari data jumlah desa tertinggal sudah tidak ada dan untuk sangat tertinggal masih terdapat 1 Desa yaitu Desa Wonorejo di Kecamatan Juai dimana desa tersebut sedang dalam proses penggabungan desa dengan Desa Sumber Rejeki.



**DATA DESA DENGAN STATUS DESA BERKEMBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>STATUS IDM</b>
1	MUARA NINIAN	JUAI	BERKEMBANG
2	HAMARUNG	JUAI	BERKEMBANG
3	JUAI	JUAI	BERKEMBANG
4	BATA	JUAI	BERKEMBANG
5	GALUMBANG	JUAI	BERKEMBANG
6	SUNGAI BATUNG	JUAI	BERKEMBANG
7	TIGARUN	JUAI	BERKEMBANG
8	PAMURUS	JUAI	BERKEMBANG
9	MARIAS	JUAI	BERKEMBANG
10	LALAYAU	JUAI	BERKEMBANG
11	MIHU	JUAI	BERKEMBANG
12	TAWAHAN	JUAI	BERKEMBANG
13	GULINGGANG	JUAI	BERKEMBANG
14	PANIMBAAN	JUAI	BERKEMBANG
15	HAUWAI	HALONG	BERKEMBANG
16	BUNTU PILANDUK	HALONG	BERKEMBANG
17	MAMANTANG	HALONG	BERKEMBANG
18	BINUANG SANTANG	HALONG	BERKEMBANG
19	ANIUNGAN	HALONG	BERKEMBANG
20	KARYA	HALONG	BERKEMBANG
21	MARAJAI	HALONG	BERKEMBANG
22	MAUYA	HALONG	BERKEMBANG
23	SUMBER AGUNG	HALONG	BERKEMBANG
24	MAMIGANG	HALONG	BERKEMBANG
25	BADALUNGA	AWAYAN	BERKEMBANG
26	NUNKA	AWAYAN	BERKEMBANG
27	KEDONDONG	AWAYAN	BERKEMBANG
28	BARAMBAN	AWAYAN	BERKEMBANG
29	BUNGUR	BATUMANDI	BERKEMBANG
30	BAKUNG	BATUMANDI	BERKEMBANG
31	KARUH	BATUMANDI	BERKEMBANG
32	TANAH HABANG KIRI	LAMPIHONG	BERKEMBANG

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

33	PANAITAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
34	TANAH HABANG KANAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
35	LAJAR	LAMPIHONG	BERKEMBANG
36	KUSAMBI HULU	LAMPIHONG	BERKEMBANG
37	MATANG LURUS	LAMPIHONG	BERKEMBANG
38	LOK HAMAWANG	LAMPIHONG	BERKEMBANG
39	SUNGAI TABUK	LAMPIHONG	BERKEMBANG
40	PIMPING	LAMPIHONG	BERKEMBANG
41	PAPUYUAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
42	LASUNG BATU	PARINGIN	BERKEMBANG
43	PARAN	PARINGIN	BERKEMBANG
44	LAMIDA BAWAH	PARINGIN	BERKEMBANG
45	TARANGAN	PARINGIN SELATAN	BERKEMBANG
46	DAYAK PITAP	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
47	SIMPANG BUMBUAN	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
48	GUNUNG BATU	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
49	AJUNG	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
50	KAMBIYAIN	TEBING TINGGI	BERKEMBANG

**DATA DESA DENGAN STATUS DESA MAJU**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	BUNTU KARAU	JUAI	MAJU
2	SIRAP	JUAI	MAJU
3	TELUK BAYUR	JUAI	MAJU
4	HUKAI	JUAI	MAJU
5	MUNGKUR UYAM	JUAI	MAJU
6	SUMBER REJEKI	JUAI	MAJU
7	BANGKAL	HALONG	MAJU
8	MANTUYAN	HALONG	MAJU
9	TABUAN	HALONG	MAJU
10	PUYUN	HALONG	MAJU

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

11	GUNUNG RIUT	HALONG	MAJU
12	BINJAI PUNGGAL	HALONG	MAJU
13	LIYU	HALONG	MAJU
14	BINJU	HALONG	MAJU
15	UREN	HALONG	MAJU
16	SURYATAMA	HALONG	MAJU
17	BARUH PANYAMBARAN	HALONG	MAJU
18	BIHARA	AWAYAN	MAJU
19	PEMATANG	AWAYAN	MAJU
20	MERAH	AWAYAN	MAJU
21	AWAYAN	AWAYAN	MAJU
22	PUDAK	AWAYAN	MAJU
23	TUNDAKAN	AWAYAN	MAJU
24	SIKONTAN	AWAYAN	MAJU
25	PULANTAN	AWAYAN	MAJU
26	TUNDI	AWAYAN	MAJU
27	MUARA JAUA	AWAYAN	MAJU
28	BIHARA HILIR	AWAYAN	MAJU
29	BARUH PANYAMBARAN	AWAYAN	MAJU
30	AWAYAN HILIR	AWAYAN	MAJU
31	PUTAT BASIUN	AWAYAN	MAJU
32	SEI PUMPUNG	AWAYAN	MAJU
33	BADALUNGGGA GILIR	AWAYAN	MAJU
34	TANGALIN	AWAYAN	MAJU
35	AMBAKIANG	AWAYAN	MAJU
36	PIYAIT	AWAYAN	MAJU
37	TARIWIN	BATUMANDI	MAJU
38	LOKBATU	BATUMANDI	MAJU
39	MUNJUNG	BATUMANDI	MAJU
40	PELAJAU	BATUMANDI	MAJU
41	BATUMANDI	BATUMANDI	MAJU

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

42	RIWA	BATUMANDI	MAJU
43	MAMPARI	BATUMANDI	MAJU
44	TIMBUN TULANG	BATUMANDI	MAJU
45	BANUA HANYAR	BATUMANDI	MAJU
46	GUHA	BATUMANDI	MAJU
47	GUNUNG MANAU	BATUMANDI	MAJU
48	KASAI	BATUMANDI	MAJU
49	BATU MERAH	LAMPIHONG	MAJU
50	LAMPIHONG KANAN	LAMPIHONG	MAJU
51	LAMPIHONG SELATAN	LAMPIHONG	MAJU
52	LAMPIHONG KIRI	LAMPIHONG	MAJU
53	KUSAMBI HILIR	LAMPIHONG	MAJU
54	KUPANG	LAMPIHONG	MAJU
55	TAMPANG	LAMPIHONG	MAJU
56	MATANG HANAU	LAMPIHONG	MAJU
57	LOK PANGINANGAN	LAMPIHONG	MAJU
58	JUNGKAL	LAMPIHONG	MAJU
59	JIMAMUN	LAMPIHONG	MAJU
60	HILIR PASAR	LAMPIHONG	MAJU
61	TELUK KARYA	LAMPIHONG	MAJU
62	SUNGAI AWANG	LAMPIHONG	MAJU
63	KANDANG JAYA	LAMPIHONG	MAJU
64	MUNDAR	LAMPIHONG	MAJU
65	BALANG	PARINGIN	MAJU
66	KALAHIAN	PARINGIN	MAJU
67	LAYAP	PARINGIN	MAJU
68	MURUNG ILUNG	PARINGIN	MAJU
69	MANGKAYAHU	PARINGIN	MAJU
70	LOK BATUNG	PARINGIN	MAJU
71	DAHAI	PARINGIN	MAJU
72	HUJAN MAS	PARINGIN	MAJU

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

73	BABAYAU	PARINGIN	MAJU
74	BALIDA	PARINGIN	MAJU
75	SUNGAI KETAPI	PARINGIN	MAJU
76	BARUH BAHINU LUAR	PARINGIN SELATAN	MAJU
77	INAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
78	BARUH BAHINU DALAM	PARINGIN SELATAN	MAJU
79	PANGGUNG	PARINGIN SELATAN	MAJU
80	HALUMBANG	PARINGIN SELATAN	MAJU
81	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
82	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
83	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
84	BUNGIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
85	MARADAP	PARINGIN SELATAN	MAJU
86	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
91	SUMGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
92	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
93	MAYANU	TEBING TINGGI	MAJU
94	AUH	TEBING TINGGI	MAJU
95	LANGKAP	TEBING TINGGI	MAJU
96	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	MAJU
79	PANGGUNG	PARINGIN SELATAN	MAJU
80	HALUMBANG	PARINGIN SELATAN	MAJU
81	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
82	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
83	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
84	BUNGIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
85	MARADAP	PARINGIN SELATAN	MAJU

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

86	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
91	SUMGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
92	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
93	MAYANU	TEBING TINGGI	MAJU
94	AUH	TEBING TINGGI	MAJU
95	LANGKAP	TEBING TINGGI	MAJU
96	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	MAJU

**DATA DESA DENGAN STATUS DESA MANDIRI**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	HALONG	HALONG	MANDIRI
2	KAPUL	HALONG	MANDIRI
3	PADANG RAYA	HALONG	MANDIRI
4	MANTIMIN	BATUMANDI	MANDIRI
5	TELUK MASJID	BATUMANDI	MANDIRI
6	HAMPARAYA	BATUMANDI	MANDIRI
7	SIMPANG TIGA	LAMPIHONG	MANDIRI

**DATA DESA DENGAN STATUS SANGAT TERTINGGAL**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	WONOREJO	JUAI	SANGAT TERTINGGAL

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

- a. Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan pada tahun 2022 mendukung capaian tersebut yaitu Program



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pembinaan Teknologi Tepat Guna, Pembinaan PKK dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa didukung dengan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

- b. Adanya dukungan pemerintah pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan penguncuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya sehingga dapat mendukung dalam pembangunan desa.
- c. Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA KAbupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- d. Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan IDM dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKEI, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan

masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Berdasarkan 3 (tiga) pilar ketahanan tersebut diatas Kabupaten Balangan pada tahun 2022 memiliki kenaikan di beberapa status desa serta akan berdampak baik untuk desa tersebut. Secara khusus dan baik bagi Kabupaten Balangan secara umum.

Berikut sampel dari ketahanan sosial yang mengalami kenaikan status desanya:

1. Kecamatan Awaran Desa Tangalin
  - a. Peningkatan terhadap layanan kesehatan masyarakat;
  - b. Kemudahan akses terhadap layanan masyarakat dan dalam peningkatan ekonomi;
  - c. Layanan air bersih membaik dan murah
  - d. Jaringan komunikasi lancar dikarenakan pemdes memfasilitasi penyediaan wifi
2. Kecamatan Awaran Desa Pulantan
  - a. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat nilai kesejahteraan meningkat
  - b. Adanya peningkatan Akses pada aspek-aspek ekonomi
  - c. Akses informasi dan komunikasi lancar
  - d. Peningkatan tahap kesehatan masyarakat
  - e. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih makin membaik
  - f. Ketertiban lingkungan membaik karena aktifnya kegiatan linmas
3. Kecamatan Awaran Desa Muara Jaya

- a. Dengan adanya perbaikan akses pendidikan maka hampir semua anak<sup>2</sup> wajib sekolah memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Sedangkan untuk yang putus sekolah melanjutkan pada tahap kelas paket sesuai jenjang.
- b. Keberdayaan perempuan meningkat dalam hal peningkatan ekonomi keluarga.
- c. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat dikarenakan tersedianya jaringan air bersih dan sadarnya masyarakat terhadap perilaku hidup bersih

### 3.3.1.1 KABID ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENATAAN DESA Pencapaian Kinerja

Bidang administrasi pemerintahan dan penataan desa adalah bidang yang bertugas dalam kegiatan tata laksana dalam pengambilan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Tujuan dari administrasi pemerintahan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan menjamin akuntabilitas. Sedangkan Penataan Desa adalah tindakan daerah untuk melakukan penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Pada tahun 2022 Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa memiliki sasaran “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa” dengan Indikator “Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu”. Berikut merupakan pencapaian dari kinerja kepala bidang:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	80%	80%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja dari Indikator” Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu” berdasarkan target yang ditetapkan adalah 80% dan realisasi 80% sehingga persentase capaian kinerja 100%. Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa serta tugas-tugas keuangan. Formulasi yang digunakan untuk dapat menghitung indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{=Jumlah Desa yang menyampaikan LPPD Tepat Waktu} \times 100\%}{\text{Jumlah Desa}}$$

Mengacu pada rumus diatas bahwa pada tahun 2022 terkait jumlah desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu berjumlah 123 Desa dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Balangan 154 Desa. Upaya yang dilakukan agar pihak kepala desa dapat menyampaikan LPPD sehingga tertib aturan maka dibuat sebuah kebijakan seluruh pemerintah desa wajib menyampaikan LPPD sehingga penyaluran ADD tahap 2 dapat dilakukan.

Pencapaian Indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan program maupun kegiatan yang ada pada Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa.

1. Program : Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran ini, tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan sebagai berikut:

#### **Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya penetapan APBDes Tepat Waktu	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu	75 %	75%	100%

2	Terinventarisasinya asset desa	Peresntase penyampaian laporan inventaris asset desa tepat waktu	70%	80%	114%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>107%</b>



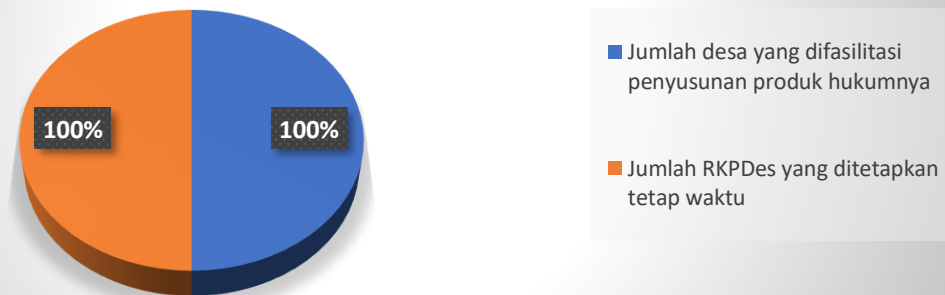
Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel dan diagram diatas, pencapaian kinerja dari sasaran “Terlaksananya penetapan APBDes Tepat Waktu” dengan indikator kinerja “Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu” target yang ditetapkan 75% dengan realisasi 75% sehingga persentase capaian kinerja 100%. Hal tersebut diperoleh dari Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah Desa di Kabupaten Balangan di kali 100%. Pada tahun 2022 jumlah desa yang mengumpulkan APBDes tepat waktu adalah 115 Desa dari jumlah desa di Kabupaten Balangan 154 Desa.

Pencapaian Indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan Kegiatan dengan Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

**Perjanjian Kinerja JF Analis Kebijakan Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersusunnya produk hukum desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154 Desa	154 Desa	100%
2	Terlaksananya Penetapan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tetap waktu	154 Desa	154 Desa	100%
3	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang selesai penetapan batas desa	-	-	-
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100%</b>

**CAPAIAN KINERJA JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN DESA)**



Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel dan grafik diatas, sasaran pertama “Tersusunnya produk hukum desa” dengan Indikator “Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya” dengan target 154 Desa dan realisasi 154 Desa sehingga persentase capaian 100%. Selanjutnya sasaran kedua “Terlaksananya Penetapan RKPDes Tepat Waktu” dengan Indikator “Jumlah RKPDes yang ditetapkan tetap waktu” target 154 Desa realisasi 154 Desa sehingga persentase capaian kinerja 100%.



Pencapaian Indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan Kegiatan dengan Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

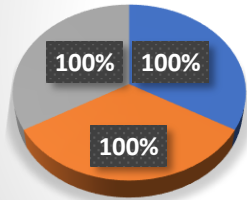


*Kegiatan Fasilitasi Konsultasi Penyusunan RKPDes*

**Perjanjian Kinerja JF Analis Kebijakan Ahli Muda**

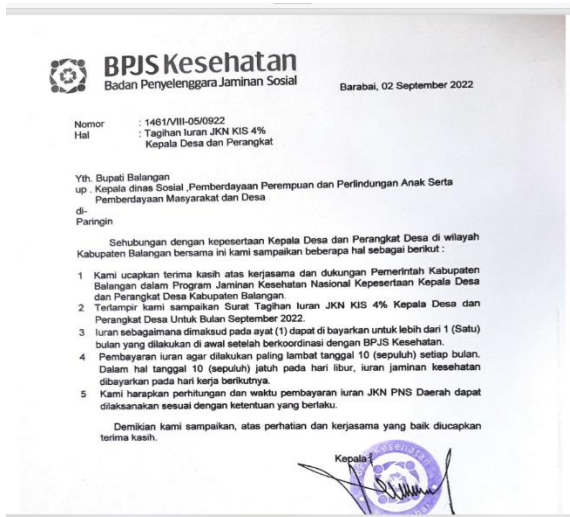
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase aparatur desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	92%	92%	100%
2	Terlaksannanya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina aparatur pemerintah desa	154 Desa	154 Desa	100%
3	Terlaksananya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah desa peserta lomba desa dengan klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100%</b>

**CAPAIAN KINERJA SUB KOORDINATOR BINA  
ADMINISTRASI APARATUR DESA**



- Persentase aparaturnya yang terfasilitasi jaminan kesehatannya
- Jumlah desa yang telah dibina aparaturnya
- Jumlah desa peserta lomba desa dengan klasifikasi berkembang dan cepat berkembang

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel dan grafik diatas, bahwa sub koordinator bina aparaturnya desa dalam pencapaian kinerja memiliki 3 (tiga) sasaran. Sasaran pertama "Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dengan indikator "Persentase aparaturnya yang terfasilitasi jaminan kesehatannya" dengan target yang ditetapkan 92% dan realisasi 92% sehingga persentase capaian 100%. Upaya dengan tercapainya indikator tersebut adalah menjalin koordinasi dengan pihak BPJS dan memberikan pelayanan kepada aparaturnya desa agar dapat terjamin terkait fasilitas kesehatan.



Nomor Virtual Account	Jumlah yang Harus Dibayarkan	Jumlah Pegawai	Jumlah Tanggungan	Tanggal Cetak	Tanggal Jatuh Tempo
Virtual Account Number	Amount Due To Be Paid	Number of Employees	Number of Dependents	Statement Date	Payment Due Date
BNI : 8888884040382001	Rp. 234.728.940	1009	1422	01/09/2022	10/09/2022
BRU : 8888884040382001					
MOR : 8888884040382001					
BTN : 8888884040382001					

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Amount
01/09/2022	Saldo Awal Tagihan Previous Balance	Rp. 117.422.600
	Premi Iuran Contribution	Rp. 117.306.340
	<b>Total Tagihan Total Balance</b>	<b>Rp. 234.728.940</b>

**TAGIHAN IURAN JKN-KIS KEPALA DESA DAN PERANGKAT TAHUN 2022**

Selanjutnya sasaran kedua "Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa" dengan indikator "Jumlah desa yang telah dibina aparaturnya pemerintah desa nya" dengan target 154 Desa dan realisasi 154 desa sehingga persentase capaian 100%. Dalam mendukung tercapainya target dari indikator telah

dilakukan kegiatan dalam hal peningkatan kapasitas terhadap kepala desa, perangkat desa, serta BPD dalam hal Tugas dan Fungsi baik dari Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD. Selain itu kegiatan peningkatan kapasitas dalam perencanaan di desa serta penatausahaan keuangan dan administrasi yang ada di desa.

Sasaran yang ketiga “Jumlah desa yang telah dibina aparatur pemerintah desarnya” dengan Indikator “ Jumlah desa peserta lomba desa dengan klasifikasi berkembang dan cepat berkembang” dengan target yang ditetapkan 9 Desa/kelurahan dan realisasi 9 Desa/Kelurahan dengan persentase capaian 100%. Lomba desa/kelurahan merupakan sebuah kegiatan dalam mengukur serta mengevaluasi dari perkembangan dari masing-masing desa. Tingkatan dari lomba dilakukan oleh pihak kecamatan terhadap desa-desa yang ada dikecamatan dan kemudian desa tersebut yang akan menjadi perwakilan dari masing-masing kecamatan dan akan dilakukan penilaian oleh pihak Kabupaten. Dalam pelaksanaan penilaian lomba desa/kelurahan menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan” serta Juknis dari Kementerian Dalam Negeri.

Pencapaian Indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

### **3.3.1.2 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA DESA**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa adalah sebuah area yang memiliki tanggungjawab dalam upaya mengembangkan kemandirian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan. Selanjutnya Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antardesa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang mendapatkan biaya operasional	50%	62%	124%
		Persentase BUMDes yang berkembang	17,26%	16,03%	92,87%
Rata-Rata Capaian					108,43%



Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel serta grafik diatas bahwa dalam Pencapaian Kinerja dari Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja sama desa memiliki satu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui Lembaga kemasyarakatan desa” dengan indikator yang pertama “Persentase Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang mendapatkan biaya operasional” dengan target 50% dan realisasi 62% dengan persentase capaian 124%. Selanjutnya Indikator yang kedua “Persentase BUMDes yang berkembang” dengan target 17,26% dan realiasi 16,03% dengan persentase capaian 92,87%. Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator tersebut adalah:



*Kegiatan FGD BUMDES*



*Sosialisasi terkait Produk Unggulan*

**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa Dan  
Swadaya Masyarakat**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terfasilitasinya kerjasama antar desa	Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%
2	Terlaksananya pembangunan Kawasan perdesaan yang difasilitasi	Jumlah pembangunan Kawasan perdesaan yang difasilitasi	1 Kawasan	0 Kawasan	0%
Rata-Rata Capaian					0



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas terkait capaian kinerja dari Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa dan Swadaya Masyarakat yang memiliki dua sasaran dan dua indikator. Sasaran pertama “Terfasilitasinya kerjasama antar desa” dengan indikator “Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi” dengan target 1 kerjasama dan realisasi 1 kerjasama dengan persentase 100%.

Mengacu pada Peraturan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Ruang lingkup da dibedakan menjadi kerja sama antar desa dan kerja sama anantara desa dengan pihak ketiga. Kerjasama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pertimbangan atas kebutuhan desa dan kemampuan Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa. Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta, organisasi kemasayarakatan, dan lembaga lainnya.

Untuk 2022 kegiatan yang dilakukan dalam menjawab indikator tersebut telah dilakukan kerja sama dengan Lembaga lainnya dalam hal ini TNI. Hal tersebut dilakukan untuk bidang dan potensi desa yang dikerjasamakan antar desa dalam hal ini pembangunan desa, dimana dilakukan pembangunan jalan untuk dapat membuat akses mobilisasi semakin mudah dan lancar. Kegiatan TMMD tersebut dilaksanakan di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong.

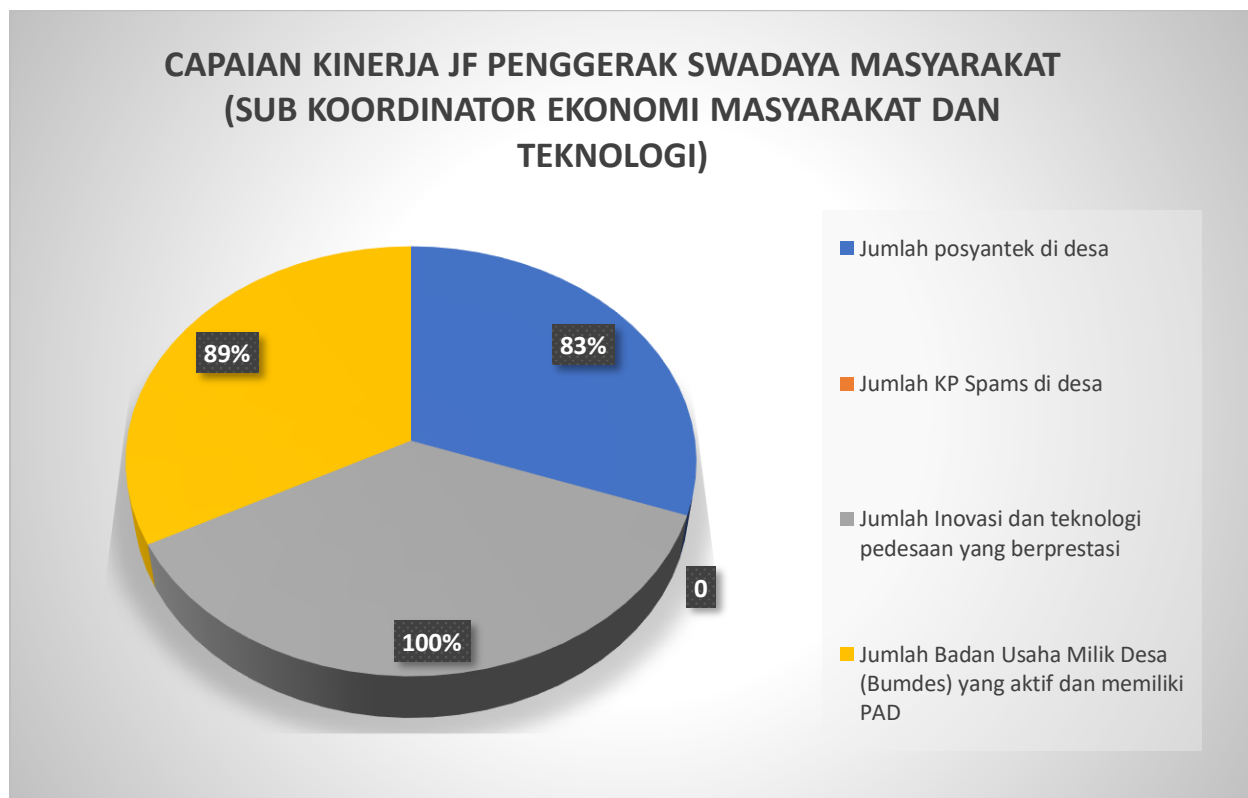


Pencapaian Indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi



**Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemanfaatan TTG dan SDA bagi masyarakat pedesaan	Jumlah posyantek di desa	40 Desa/Kelurahan	33 Desa/Kelurahan	83%
		Jumlah KP Spams di desa	140 KP-Spams	0	0 %
		Jumlah Inovasi dan teknologi pedesaan yang berprestasi	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	100%
2	Meningkatnya pendapatan asli desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	56 Bmudes	50 Bumdes	89%
Rata-Rata Capaian					90,67%



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel serta grafiik diatas, bahwa pencapaian kinerja dari sub coordinator ekonomi masyarakat dan teknologi memiliki 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat indikator). Sasaran yang pertama “Meningkatnya pemanfaatan TTG dan SDA bagi masyarakat pedesaan” dengan Indikator pertama ” Jumlah posyantek di desa” dengan target 40 Desa/Kelurahan dan realisasi 33 Desa/Keluaraha sehingga persentase capaian 83 %.

Indikator kedua “Jumlah KP Spams didesa” dengan target 140 KP-Spams dan realisasi tidak ada pada tahun 2022. KP=SPAMD merupakan salah satu Lembaga otonom yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) memiliki arti penting dan strategis dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Berdasarkan laporan bahwa untuk Kabupaten Balangan terkait program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sudah terpenuhi, sehingga target yang ditetapkan tidak memiliki realiasi. Indikator ketiga “Jumlah Inovasi dan teknologi pedesaan yang berprestasi” dengan target 3 Inovasi dan realisasi 3 Inovasi sehingga persentase capaian 100%.

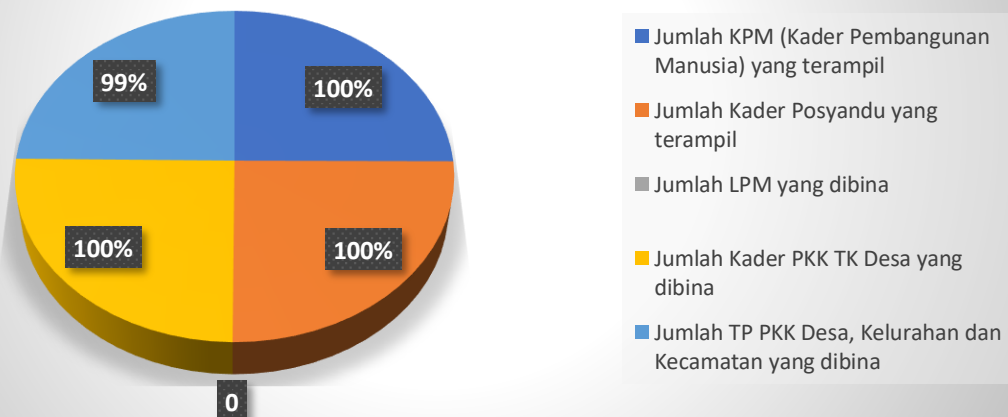
Sasaran yang kedua “Meningkatnya pendapatan asli desa” dengan indikator “Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD” dengan target yang ditetapkan 56 Bumdes dan realisasi 50 BUMDess sehingga capaian kinerja 89%.

Pencapaian Indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

## Perjanjian Kinerja JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kapasitas kader Lembaga kemasyarakatan	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	80 Desa/Kelurahan	80 Desa/Kelurahan	100%
		Jumlah Kader Posyandu yang terampil	80 Orang	80 Orang	100%
		Jumlah LPM yang dibina	8 LPM	8 LPM	0
		Jumlah Kader PKK TK Desa yang dibina	164 Orang	164 Orang	100%
2	Meningkatnya kualitas PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165 Orang	164 Orang	99%
Rata-Rata Capaian					99,75%

**CAPAIAN KINERJA JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN ADAT)**



Berdasarkan table dan diagram diatas, dapat diketahui bahwa Sub Koordinator Kelembagaan Masyarakat dan Adat memiliki 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) Indikator kinerja. Sasaran pertama “Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil” dengan target 80 Desa/Kelurahan dan realisasi 80 Desa/Kelurahan sehingga persentase 100%. Indikator yang kedua “Jumlah Kader Posyandu yang terampil” dengan target 80 Orang dan realisasi 80 Orang sehingga capaian 100%. Indikator ketiga “Jumlah LPM yang dibina” dengan target 8 LPM dan belum ada realisasi akan indikator tersebut. Indikator keempat “Jumlah Kader PKK TK Desa yang dibina dengan target 164 orang dan realisasi 164 orang sehingga persentase 100%.

Sasaran kedua “ Meningkatkan kualitas PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan keluarga” dengan indikator “Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina” dengan target 165 Orang dan realisasi 164 orang sehingga persentase capaian 99%.

Pencapaian Indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PROGRAM DAN KEGIATAN**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BALANGAN  
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI TA. 2022**

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Ya	Tidak	Ket.
Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	496.925.000	496.925.000		
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	93.431.050	93.431.050		
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	83.841.050	83.841.050		
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	9.590.000	9.590.000		
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	4.405.000	4.405.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	4.405.000	4.405.000		

		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	399.088.950	399.088.950		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	79.900.000	79.900.000		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	77.299.950	77.299.950		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	203.400.000	203.400.000		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	38.489.000	38.489.000		
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	1.068.515.250	1.068.515.250		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.068.515.250	1.068.515.250		



		Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	217.059.000	217.059.000		
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	172.906.800	172.906.800		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	393.495.000	393.495.000		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	177.258.450	177.258.450		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	107.796.000	107.796.000		
			Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan				
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial</b>	4.425.203.003	4.425.203.003		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	4.425.203.003	4.425.203.003		

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	172.540.000	172.540.000		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	4.094.443.003	4.094.443.003		
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	158.220.000	158.220.000		
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	559.864.400	559.864.400		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	433.801.000	433.801.000		
		Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	433.801.000	433.801.000		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	126.063.400	126.063.400		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	126.063.400	126.063.400		
				<b>6.550.507.653</b>	<b>6.550.507.653</b>		

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Meningkatnya kesetaraan gender	IKU 2 (IPG, IDG, Persentase pada belanja langsung APBD)	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	1.016.535.000	1.016.535.000		
			IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)				
			IPG ( Indeks Pembangunan gender)				
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	99.670.000	99.670.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	79.670.000	79.670.000		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	916.865.000	916.865.000		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,	16.865.000	16.865.000		

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

		dan Ekonomi	sosial dan ekonomi				
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	900.000.000	900.000.000		
			Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan				
			Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan				
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	194.147.750	194.147.750		
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	119.077.750	119.077.750		
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan desa	119.077.750	119.077.750		

			Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan				
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	75.070.000	75.070.000		
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	75.070.000	75.070.000		
			Jumlah klien pada PUSPAGA				
				<b>194.147.750</b>	<b>194.147.750</b>		
Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	71.702.500	71.702.500		
	Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	46.680.000	46.680.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	46.680.000	46.680.000		

		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	25.022.500	25.022.500		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	25.022.500	25.022.500		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	46.680.000	46.680.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	46.680.000	46.680.000		
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	25.022.500	25.022.500		
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	116.942.950	116.942.950		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	17.350.000	17.350.000		



		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	17.350.000	17.350.000		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	56.472.850	56.472.850		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	56.472.850	56.472.850		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	43.120.100	43.120.100		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	43.120.100	43.120.100		
			Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa				
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data	94.534.250	94.534.250		

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

			gender dan anak				
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	94.534.250	94.534.250		
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	62.304.250	62.304.250		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik				
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	32.230.000	32.230.000		
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	256.762.750	256.762.750		
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Layak Anak	104.916.750	104.916.750		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	78.540.000	78.540.000		

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

			jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sekolah yang ramah anak	26.376.750	26.376.750		
			jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak				
			jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak				
			jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak				
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	151.846.000	151.846.000		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	9.675.000	9.675.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	102.678.000	102.678.000		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	25.310.000	25.310.000		

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

		Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	14.183.000	14.183.000		
			Jumlah Ruang Laktasi				
			Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak				
				<b>539.942.450</b>	<b>539.942.450</b>		
Meningkatnya klasifikasi desa	Persentase desa dengan klasifikasi minimal maju	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	2.372.080.150	2.372.080.150		
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	2.372.080.150	2.372.080.150		
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunann kawasan perdesaan yang difasilitasi	2.200.000.000	2.200.000.000		
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	172.080.150	172.080.150		
		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	2.371.251.000	2.371.251.000		

		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa	2.371.251.000	2.371.251.000		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatan	1.463.280.000	1.463.280.000		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	32.665.000	32.665.000		
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	165.745.000	165.745.000		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	479.030.000	479.030.000		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	87.975.000	87.975.000		
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat	80.480.000	80.480.000		
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	62.076.000	62.076.000		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	4.331.385.750	4.331.385.750		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	4.331.385.750	4.331.385.750		

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

		Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	401.693.000	401.693.000		
			Jumlah Kader Posyandu yang terampil				
			Jumlah LPM dibina				
			Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina				
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	2.014.669.250	2.014.669.250		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	135.799.800	135.799.800		
			Jumlah KP-Spams di des				



PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

			Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi				
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	1.779.223.700	1.779.223.700		
				<b>9.074.716.900</b>	<b>9.074.716.900</b>		

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan dan aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

Alokasi anggaran sebesar Rp.29.669.164.407 (dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Balangan dengan realisasi anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp.25.936.934.756 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima enam rupiah) atau sekitar 87,42%.

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persen</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>12.233.864.654</b>	<b>10.207.204.316</b>	<b>83,43</b>
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik			
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	152.577.350	148.288.666	97,19
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	80.270.000	76.406.800	95,19

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja	72.307.350	71.881.866	99,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	8.366.011.604	6.523.936.903	77,98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	8.366.011.604	6.523.936.903	77,98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.300.000	335.130.000	96,77
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	158.300.000	156.630.000	98,95
	Jumlah kain sasirangan yang diadakan			
	Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	188.000.000	178.500.000	94,95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1.281.352.800	1.239.924.446	96,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	30.977.800	30.539.400	98,58
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	500.798.100	463.728.100	92,60
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	49.816.900	49.815.950	100

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

	disediakan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4.960.000	2.850.000	57,46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	694.800.000	692.990.996	99,74
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	271.500.000	249.204.000	91,79
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dibeli	271.500.000	249.204.000	91,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.393.170.400	1.299.030.949	93,24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900.000	-	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.321.300	164.793.973	70,33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.157.949.100	1.134.236.976	97,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.952.500	411.689.352	97,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	422.952.500	411.689.352	97,34
<b>URUSAN SOSIAL</b>		<b>6.609.957.653</b>	<b>6.411.414.850</b>	<b>97,00</b>
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	496.925.000	481.046.050	96,80
Pemberdayaan Sosial	Jumlah warga KAT	93.431.050	93.355.050	99,92

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

Komunitas Adat Terpencil (KAT)	yang mendapatkan Pelayanan			
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	83.841.050	83.805.050	99,96
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	9.590.000	9.550.000	99,58
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	4.405.000	4.405.000	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	4.405.000	4.405.000	100
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	399.088.950	383.286.000	96,04
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	79.900.000	78.108.000	97,76
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	77.299.950	77.252.200	99,94
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	203.400.000	195.374.800	96,05
	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi			
Peningkatan	Jumlah LKS yang	38.489.000	32.551.000	84,57

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	mendapatkan pendampingan dan pembinaan			
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	1.068.515.250	939.505.200	87,93
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.068.515.250	939.505.200	87,93
Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	217.059.000	202.926.400	93,49
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	172.906.800	120.944.900	69,95
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	393.495.000	358.981.100	91,23
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	177.258.450	164.113.850	92,58
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	107.796.000	92.538.950	85,85
	Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan			



PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	pelatihan serta bantuan alat keterampilan			
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial</b>	4.425.203.003	4.417.317.400	99,82
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	4.425.203.003	4.417.317.400	99,82
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	172.540.000	169.162.100	98,04
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	4.094.443.003	4.092.210.000	99,95
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	158.220.000	155.945.300	98,56
	Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan			
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</b>	559.864.400	524.246.200	93,64
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	433.801.000	400.380.500	92,30
Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	433.801.000	400.380.500	92,30
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	126.063.400	123.865.700	98,26
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan	126.063.400	123.865.700	98,26

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

	keterampilan kebencanaan			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase makam yang terawat</b>	59.450.000	49.300.000	82,93
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	59.450.000	49.300.000	82,93
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	59.450.000	49.300.000	82,93
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		1.750.625.200	1.651.188.363	94,32
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	1.016.535.000	950.382.075	93,49
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			
	IPG ( Indeks Pembangunan gender)			
Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	99.670.000	97.919.075	98,24
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	20.000.000	19.980.000	99,90
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	79.670.000	77.939.075	97,83
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	916.865.000	852.463.000	92,98

## PEMERINTAH KABUPATEN

## DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	16.865.000	16.270.000	96,47
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	900.000.000	836.193.000	92,91
	Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan			
	Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan			
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	71.702.500	63.908.500	89,13
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	46.680.000	42.020.000	90,02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	46.680.000	42.020.000	90,02
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	25.022.500	21.888.500	87,48

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	25.022.500	21.888.500	87,48
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	194.147.750	183.410.750	94,47
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	119.077.750	117.502.750	98,68
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan desa	119.077.750	117.502.750	98,68
	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan			
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	75.070.000	65.908.000	87,80
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	75.070.000	65.908.000	87,80
	Jumlah klien pada PUSPAGA			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	94.534.250	91.466.416	96,75
Pengumpulan,	Jumlah dokumen data	94.534.250	91.466.416	96,75

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang disusun dan divalidasi			
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	62.304.250	60.786.416	97,56
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik			
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	32.230.000	30.680.000	95,19
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	256.762.750	250.013.672	97,37
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Layak Anak	104.916.750	100.419.772	95,71
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	78.540.000	74.931.022	95,40
	jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sekolah yang ramah anak	26.376.750	25.488.750	96,63
	jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak			
	jumlah mesjid yang			

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

	memenuhi kriteria ramah anak			
	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	151.846.000	149.593.900	98,52
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	9.675.000	9.665.000	99,90
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	102.678.000	100.727.900	98,10
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	25.310.000	25.180.000	99,49
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	14.183.000	14.021.000	98,86
	Jumlah Ruang Laktasi			
	Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak			
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan	116.942.950	112.006.950	95,78



**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

	penanganan secara komprehensif			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	17.350.000	17.080.000	98,44
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	17.350.000	17.080.000	98,44
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	56.472.850	51.936.850	91,97
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	56.472.850	51.936.850	91,97
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	43.120.100	42.990.100	99,70
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	43.120.100	42.990.100	99,70
	Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa			
<b>URUSAN PMD</b>		<b>9.074.716.900</b>	<b>7.667.127.227</b>	<b>84,49</b>

## PEMERINTAH KABUPATEN

## DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	2.372.080.150	2.347.729.475	98,97
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	2.372.080.150	2.347.729.475	98,97
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunann kawasan perdesaan yang difasilitasi	2.200.000.000	2.185.550.075	99,34
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	172.080.150	162.179.400	94,25
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	2.371.251.000	2.255.339.164	95,11
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa	2.371.251.000	2.255.339.164	95,11
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	1.463.280.000	1.402.909.420	95,87
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	32.665.000	31.985.400	97,92
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	165.745.000	160.827.600	97,03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	479.030.000	463.720.800	96,80
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	87.975.000	69.676.344	79,20
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat	80.480.000	65.143.600	80,94
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	62.076.000	61.076.000	98,39
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan	4.331.385.750	3.064.058.588	70,74

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD**

<b>MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase BUMDes yang Berkembang			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	4.331.385.750	3.064.058.588	70,74
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	401.693.000	396.709.495	98,76
	Jumlah Kader Posyandu yang terampil			
	Jumlah LPM dibina			
	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	2.014.669.250	904.933.955	44,92
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	135.799.800	119.937.000	88,32
	Jumlah KP-Spams di desa			
	Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi			
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	1.779.223.700	1.642.478.138	92,31
<b>JUMLAH</b>		<b>29.669.164.407</b>	<b>25.936.934.756</b>	<b>87,42</b>

**EFISINESI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)</b>	<b>%Capaian Kinerja (%)</b>	<b>% Penyerapan Anggaran (%)</b>	<b>Efisien</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>93</b>	83,43	13,07
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100	97,19	2,81
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100	95,19	4,81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja	100	99,41	0,59
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100	77,98	22,02
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	77,98	22,02
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	96,77	3,23

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	100	98,95	1,05
	Jumlah kain sasirangan yang diadakan	100		
	Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	100		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	94,95	5,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	96,77	3,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100	98,58	1,42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100	92,60	7,4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100	100	0,0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100	57,46	42,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99,74	0,26
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	100	91,79	8,21
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dibeli	100	91,79	8,21
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	93,24	6,76

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	100	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	70,33	29,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	97,95	2,05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97,34	2,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100	97,34	2,66
<b>URUSAN SOSIAL</b>				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	101,67	96,80	4,87
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	49,09	99,92	-50,83
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	100	99,96	0,04
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	77,14	99,58	-22,44
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	1,050	100	-98,95
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	100	100	0,0



Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	113,11	96,04	17,07
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	100	97,76	2,24
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	100	99,94	0,06
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	73,47	96,05	75,56
	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	98,14		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	100	84,57	15,43
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100	87,93	12,07
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	95,25	87,93	7,32

Pengemis di Luar Panti Sosial				
Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	93,49	6,51
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	100	69,95	30,05
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	140	91,23	48,77
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	81,48	92,58	-11,1
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35	85,85	237,15
	Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	287,5		
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial</b>	101,49	99,82	1,67
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	187,13	99,82	87,31
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	188,14	98,04	90,1
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	100	99,95	0,05

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	100	98,56	1,44
	Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	100		
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	93,64	6,36
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	10,2	92,30	-82,1
Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	10,2	92,30	-82,1
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	122,58	98,26	24,32
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	122,58	98,26	24,32
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase makam yang terawat</b>	100	82,93	17,07
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	100	82,93	17,07
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	100	82,93	17,07
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN</b>	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instan	136,43	93,49	17,81

<b>GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	si di Kabupaten			
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	98,01		
	IPG ( Indeks Pembangunan gender)	99,56		
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	100	98,24	1,76
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	100	99,90	0,1
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	100	97,83	2,17
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	100	92,98	7,02
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100	96,47	3,53
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	100	92,91	4,79
	Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	100		
	Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi	93,33		

	Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan			
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	89,13	10,87
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100	90,02	9,98
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100	90,02	9,98
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	100	87,48	12,52
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	100	87,48	12,52
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	192,35	94,47	97,88
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	127,89	98,68	29,3

Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan desa	100	98,68	1,32
	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	100		
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	122,95	87,80	35,15
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	147,22	87,80	173,4
	Jumlah klien pada PUSPAGA	114		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100	96,75	3,25
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	100	96,75	3,25
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	114,75	97,56	9,79
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	100		
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan	100	95,19	4,81

	Simfoni PPA yang telah tersaji di Website			
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	0	97,37	0
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Layak Anak	75	95,71	-20,71
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	80	95,40	-5,4
	jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	100		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sekolah yang ramah anak	100	96,63	3,37
	jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak	100		
	jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak	100		
	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	100		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100	98,52	1,48
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	107,69	99,90	7,79



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	100	98,10	1,9
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	100	99,49	0,51
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	100	98,86	1,14
	Jumlah Ruang Laktasi	0		
	Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	100		
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100	95,78	4,22
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	100	98,44	1,56
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	100	98,44	1,56
Penyediaan Layanan bagi Anak yang	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	105,37	91,97	13,4

Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan pengaduan bagi anak			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	100	91,97	8,03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	100	99,70	8,3
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	100	99,70	8,3
	Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	100		
<b>URUSAN PMD</b>				
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	100	98,97	1,03
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	100	98,97	1,03
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunann kawasan perdesaan yang difasilitasi	1	99,34	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	0	94,25	
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100	95,11	4,89
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan	200	95,11	104,89

Pemerintahan Desa	Desa			
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	100	95,87	43,13
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	100	97,92	2,08
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	97,03	2,97
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	100	96,80	3,2
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	100	79,20	20,8
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat	100	80,94	19,06
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	100	98,39	1,61
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	124	70,74	53,26
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	260	70,74	189
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	100	98,76	1,24

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Posyandu yang terampil	1000		
	Jumlah LPM dibina	0		
	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	100		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	89,29	44,92	44,37
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	82,5	88,32	2,93
	Jumlah KP-Spams di desa	0		
	Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi	100		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	99,39	92,31	7,08
<b>JUMLAH</b>			<b>87,42</b>	

**C. PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2022**

1. PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK KATEGORI MADYA KEMENTERIAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA



2. PENGHARGAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN KUALITAS PREDIKAT UTAMA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**D. BENTUK INOVASI YANG DILAKUKAN DALAM PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 dan perkembangan tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun terdapat 1 indikator yang capaian sebesar 57,89% dengan kategori rendah. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 11 anak yang terdiri jenis-jenis kasus kekerasan seksual, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan gangguan emosi. Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil” karena capaian rata-ratanya sebesar 126,21% dari target dengan jumlah indikator kinerja yang diampu berjumlah 7 (tujuh) indikator.

Meskipun masih terdapat indikator yang capaiannya masih rendah, namun secara keseluruhan capaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu dalam pencapaian indikator kinerja utama dan target yang ditetapkan telah dilakukan berbagai upaya agar dapat terpenuhinya target seperti telah melakukan kegiatan sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk bahaya bullying dan pornografi,



sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak dan remaja, dan kegiatan lainnya dalam pencapaian target tersebut.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun demikian, untuk tahun 2021, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut

1. Meningkatkan dan melanjutkan kerjasama dengan stakeholders/instansi terkait
2. Memperluas sasaran sosialisasi yang dilaksanakan, sehingga diharapkan menyentuh seluruh elemen/lapisan masyarakat.
3. Lebih meningkatkan /mempertajam program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga lebih tepat sasaran.
4. Efisiensi anggaran perlu dilakukan, agar kegiatan yang benar-benar memerlukan suport secara pendanaan lebih tercover sehingga peningkatan kinerja dapat tercapai.

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS SOSIAL, PPPA, DAN PMD

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan tahun 2022, diharapkan menjadi pedoman peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Paringin, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Serta  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Drs. Urai Nur Iskandar, MM**

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19730501 199311 1 001